

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA
DESA (DD), DAN BANTUAN KEUANGAN APBD TERHADAP BELANJA
DESA (STUDI PADA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO)**



Oleh :

Nama : Yudhi Dwi Pranata

NIM : 172010300158

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

APRIL 2023

**PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA DESA
(DD), DAN BANTUAN KEUANGAN APBD TERHADAP BELANJA DESA
(STUDI PADA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi Pada Program
Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh :

Nama : Yudhi Dwi Pranata

NIM : 172010300158

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
APRIL 2023**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA DESA
(DD), DAN BANTUAN KEUANGAN APBD TERHADAP BELANJA DESA
(STUDI PADA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO)**

Oleh :

Nama : Yudhi Dwi Pranata

NIM : 172010300158

Disetujui untuk diuji:

Pada Tanggal 13 April 2023

Dosen Pembimbing


(Sarwenda Biduri, SE, MSA)

NIDN: 0702048501

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi




(Wawit Hariyanto, SE, M.Si)

NIDN : 0714107602

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yudhi Dwi Pranata

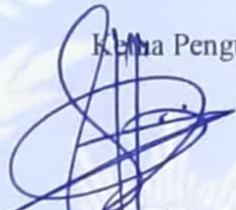
NIM : 172010300158

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal 13 April 2023

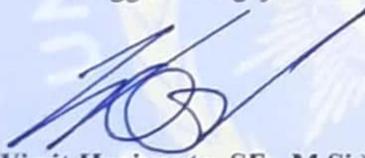
Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji


(Sarwenda Biduri, SE, MSA)

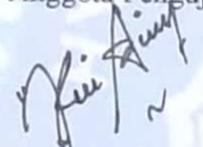
NIDN: 0702048501

Anggota Penguji


(Wiwit Harivanto, SE., M.Si.)

NIDN : 0714107602

Anggota Penguji


(Ruci Arizanda Rahayu, SE, MSA, Ak, CA)

NIDN : 0721108302

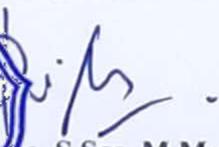
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana (S-1)

Tanggal 13 April 2023

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial




(Dekan, S.Sos., M.Med.Kom)

NIDN : 07110280001

SKRIPSI

PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA DESA (DD), DAN BANTUAN KEUANGAN APBD TERHADAP BELANJA DESA (STUDI PADA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO)

Oleh :

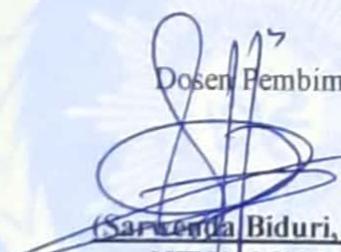
Nama : Yudhi Dwi Pranata

NIM : 172010300158

Diterima dan disahkan :

Pada tanggal 13 April 2023

Dosen Pembimbing


(Sarwenda Biduri, SE, MSA)

NIDN: 0702048501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan

Ilmu Sosial

Ketua Program Studi Akuntansi



S.Sos., M. Med. Kom)

NIDN: 37110280001



(Wahid Hariyanto, SE, M.Si)

NIDN : 0738476593

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah AWT atas segala Rahmat dan Anugerahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA DESA (DD), DAN BANTUAN KEUANGAN APBD TERHADAP BELANJA DESA (STUDI PADA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO)”**, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kuliah di Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Sarwenda Biduri, SE. MSA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, koreksi serta saran hingga terwujudnya proposal skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan pun kami sampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Hidayatulloh, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2. Wisnu Panggah Setiyono, SE., M.Si., Ph.D Selaku dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. Wiwit Hariyanto, SE., M.Si. Selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
4. Orang Tua tercinta yang telah banyak memberikan do'a dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materiil hingga proposal skripsi ini dapat selesai.

5. Adik tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan semangat kepada penulis
6. Seluruh teman-teman tercinta
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya

Kami menyadari bahwa proposal skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena sempitnya pengetahuan kami, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah S.W.T memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga proposal skripsi ini berguna baik bagi diri kami pribadi maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Sidoarjo, April 2023


Yudhi Dwi Pranata

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi disepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sidoarjo , 16 April 2023

Yang Membuat Pernyataan


Yudh Dwi Pranita
172010300158

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II_KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Tinjauan Teoritis	38
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	58
2.4 Kerangka Konseptual	61
2.5 Hipotesis.....	62
BAB III_METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Pendekatan Penelitian.....	63
3.2 Rancangan Penelitian	63
3.3 Lokasi Penelitian	66
3.4 Definisi Operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator Variabel.....	66
3.5 Populasi dan Sampel.....	73
3.6 Jenis dan Sumber Data	74
3.7 Teknik Pengumpulan Data	75
3.8 Teknik Analisis.....	76

BAB IV HASIL PENELITIAN	81
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	81
4.2 Analisis Data dan Hasil	91
4.2.1 Analisis Deskriptif	91
4.2.2 Pengujian Kualitas Data.....	99
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	102
4.2.4 Pengujian Hipotesis	105
4.3 Pembahasan.....	108
BAB V PENUTUP.....	115
5.1 Simpulan	115
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	116
5.3 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	61
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Indikator Variabel	70
Tabel 3.2 Bobot Skor Jawaban Variabel.....	75
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Sidoarjo	82
Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	91
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia Responden	93
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	93
Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	94
Tabel 4.7 Penilaian Responden Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1).....	95
Tabel 4.8 Penilaian Responden Terhadap Dana Desa (X2).....	96
Tabel 4.9 Penilaian Responden Terhadap Bantuan Keuangan APBD (X3).....	97
Tabel 4.10 Penilaian Responden Terhadap Belanja Desa (Y).....	98
Tabel 4.11 Uji Validitas.....	100
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas	102
Tabel 4.13 Uji Regresi Linier Berganda.....	103
Tabel 4.14 Hasil Uji R Square	105
Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	107
Table 4.16 Hasil Pengujian Hipotesis.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kueisioner
- Lampiran 2. Tingkat Pengembalian Kuisisioner
- Lampiran 3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
- Lampiran 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia Responden
- Lampiran 5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan
- Lampiran 6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja
- Lampiran 7. Penilaian Responden Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1)
- Lampiran 8. Penilaian Responden Terhadap Dana Desa (X2)
- Lampiran 9. Penilaian Responden Terhadap Bantuan Keuangan APBD (X3)
- Lampiran 10. Penilaian Responden Terhadap Belanja Desa (Y)
- Lampiran 11. Uji Validitas
- Lampiran 12. Uji Reliabilitas
- Lampiran 13. Uji Regresi Linier Berganda
- Lampiran 14. Hasil Uji R Square
- Lampiran 15. Hasil Uji Parsial (Uji t)
- Lampiran 16. Hasil Pengujian Hipotesis



ABSTRAK

Pranata, Yudhi Dwi. 2023. Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Sidoarjo).

Skripsi ini tidak dipublikasikan. Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Sidoarjo).

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data primer sebagai sumber data. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintahan desa kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 322 desa dan 31 kelurahan sehingga total populasinya adalah 353. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan standar eror 10%. Sehingga dengan hasil $n = N/1 + N.e^2 = 353/1 + 353.0,1^2 = 100$ desa yang dijadikan sampel. Setiap desa di berikan 3 kuesioner, karakteristik pembagian kuesioner di berikan kepada responden yang berhubungan dengan dana desa di antaranya Kepala Desa, Kaur Pembangunan, dan Kaur Keuangan. Sehingga, jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $3 \times 100 = 300$ data. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis dengan alat bantu olah data SPSS versi 27.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); Dana Desa (DD); Bantuan Keuangan APBD ; Belanja Desa

ABSTRACT

Pranata, Yudhi Dwi. 2023. The Influence of Village Fund Allocation Management (ADD), Village Funds (DD), and APBD Financial Assistance on Village Expenditure (Study in Villages in Sidoarjo Regency).

This thesis is not published. Faculty of Business, Law and Social Sciences, Muhammadiyah University of Sidoarjo.

This study aims to analyze the influence of Village Fund Allocation Management (ADD), Village Funds (DD), and APBD Financial Aid on Village Expenditures (Studies in Villages in Sidoarjo Regency).

This research method uses quantitative research with primary data as a data source. The population of this study is the Sidoarjo regency village government which consists of 322 villages and 31 sub-districts so that the total population is 353. The sampling technique used in this study uses the Slovin formula with a standard error of 10%. So the result is $n = N/1 + N.e^2 = 353/1 + 353.0.12 = 100$ villages that are sampled. Each village was given 3 questionnaires, the characteristics of the distribution of the questionnaires were given to respondents related to village funds including the Village Head, Head of Development Head, and Head of Finance. Thus, the total number of research samples becomes $3 \times 100 = 300$ data. This study used multiple linear regression analysis techniques to test the hypothesis with the SPSS version 27 data processing tool.

The results of this study indicate that the Management of Village Fund Allocations has an Influence on Village Expenditures. Village Funds Have an Influence on Village Spending. APBD Financial Assistance Affects Village Spending.

Keywords: Village Fund Allocation Management (ADD); Village Fund (DD); APBD Financial Assistance; Village Shopping

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya otonomi daerah sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, maka reformasi dalam bidang keuangan dilakukan guna memperbaiki keuangan negara dan daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah agar mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya secara maksimal. Desa merupakan lingkup kegiatan pemerintahan terkecil di dalam sebuah negara. Pemerintahan desa telah menerapkan nilai-nilai demokratis mulai dari pemilihan Kepala Desa serta penggalan dana yang bersumber dari hasil swadaya masyarakat. Desa merupakan basis pengidentifikasian permasalahan sebuah wilayah guna usulan perencanaan sebuah wilayah.

Dalam mengelola keuangan desa, juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu instrumen yang penting dalam perwujudan sistem tata kelola keuangan pemerintahan desa yang baik adalah dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam Laporan APBDes ini memuat tentang sumber-sumber penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran-

pengeluaran dalam bentuk Belanja Desa serta pembiayaan yang dibutuhkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran (Langi, 2022).

Kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan Desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah pengelolaan Belanja Desa, yang meliputi kerangka hukum, program atau kegiatan yang akan dilakukan, dan waktu atau jadwal pelaksanaan yang termasuk didalamnya tentang pelaku aktifitas, besaran anggaran yang akan digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program atau kegiatan yang dimaksud. Total anggaran belanja yang termuat dalam APBDes beserta alokasinya merupakan jumlah maksimum yang tersedia dan harus dibiayai dengan perkiraan besarnya pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa “Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa”. Belanja Desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan dimaksudkan untuk dialokasikan pada hal-hal yang produktif. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan serta pengeluaran dalam belanja desa tergantung dari pendapatan desa itu sendiri. Semakin besar pendapatan desa yang diperoleh maka akan semakin besar pula Belanja Desa yang dikeluarkan guna pembangunan desa yang lebih optimal (Pramukti, 2020).

Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi belanja desas diantaranya : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD. Setelah diterbitkan UU No. 6 tahun 2014, desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa. Dengan kata lain, penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat (Indika et al., 2022).

Desa mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Ma'ruf & Bawono, 2019).

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) harus dituangkan dalam peraturan desa dengan secara terbuka melalui musyawarah desa (Perdes). Ini mengungkapkan komitmen pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi aturan tata kelola yang baik yang harus diterapkan oleh para aktor dan desa. Pengelola

alokasi tingkat desa yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi tujuannya memerlukan pelaksanaan fungsi manajemen.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). DD diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa (Indika et al., 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah tanggung jawab dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa ren Pendapatan, belanja, and desa pembiayaan desa adalah APBD. Menurut (Sujarweni, 2015), Manfaat anggaran desa untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa (Sujarweni, 2015). Penyusunan APBDes dan kehadiran Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance.

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Di dalam APBD tercermin

kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (Langi, 2022).

Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi permasalahan diberbagai daerah/desa yaitu kontribusi alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa lebih besar dari pada kontribusi pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi dana desa (Pramukti, 2020).

Selain itu, Berdasarkan pada hasil survey di desa-desa pada kabupaten sidoarjo dalam hal pembangunan misalnya pembangunan tugu dusun, jembatan kecil untuk aliran air, sungai di sawah, sumur sawah, jalan berlubang, penerangan jalan gang kecil, dan jalan paving. Sebelumnya dilakukan perencanaan terkait pembangunan tersebut beserta anggaran dana. Namun, dikarenakan anggaran dana yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan yang tertunda karena relatif rendahnya anggaran desa sehingga belum cukup untuk melakukan pembangunan tersebut, serta terdapat pendapatan asli desa yang relatif sedikit.

Berdasarkan Belanja Desa Di Desa-Desa Pada Kabupaten Sidoarjo banyak digunakan dalam bidang pembangunan dan kesehatan. Karena setiap desa banyak sekali tempat-tempat yang harus dibangun seperti pembuatan pos kampling, pembuatan jalan paving, pembetulan jalan berlubang, pembuatan selokan/aliran air, perbaikan fasilitas desa dan lain sebagainya. Belanja Desa di Di Desa-Desa Pada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 hingga 2021 dalam bidang kesehatan terdapat

banyak digunakan untuk pembagian masker, vitamin, handsinitizer, penyemprotan disinfektan, vaksin, dan lain sebagainya.

Fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu jika Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan APBD naik maka diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan APBD turun maka akan diikuti pula dengan turunnya belanja desa. Oleh karena itu perlu adanya pembuktian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan dan hubungannya antara Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa Dan Bantuan Keuangan APBD dengan belanja desa.

Penelitian mengenai Belanja Desa sudah pernah di lakukan di Indonesia, diantaranya : Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab (2021) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa”. Temuan penelitian - Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Aloksi Dana Perimbangan Desa di Desa- desa Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 berpengaruh positif terhadap Belanja Desa. Orisinalitas/nilai - Hasil penelitian ini memiliki nilai tambah yang berkontribusi dalam memperkuat konsep pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa, baik secara parsial maupun simultan.

Alifa Fauzia Ma’ruf Dan Andy Dwi Bayu Bawono (2019) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr) Terhadap Belanja Kesehatan Dengan Jumlah Penduduk

Miskin Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DD berpengaruh terhadap Pengeluaran Kesehatan, sedangkan ADD dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Kesehatan. Namun, Jumlah Orang Miskin memiliki berpengaruh negatif sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara ADD dan Kesehatan Pengeluaran, tetapi tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara DD dan Pengeluaran Kesehatan dan juga tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara BHPR dan Belanja Kesehatan.

Miki Indika , Yayuk Marliza , Aulia Marisa (2022) meneliti tentang “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara”. Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $13,046 > 2,920$ dengan nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a (hipotesis alternative) diterima. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai hasilnya menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $13,046 > 2,920$ dengan nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a (hipotesis alternative) diterima. Berdasarkan hasil regresi secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Dana Desa (X_1) dan Alokasi Dana Desa (X_2) secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu

216,718 > 19,00 dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima (Hipotesis alternative diterima). Hasil uji koefisien determinasi (R^2), dimana Nilai dari koefisien determinan Adjusted R Square (R^2) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel dependen Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Raa'ina Syahdzat Taen, Dan Elan Eriswanto (2022) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)”. Berdasarkan hasil analisis SPSS dapat diketahui desa asli pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran desa. Namun dana desa dan dana desa alokasi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa di desa-desa di kecamatan Palabuhanratu.

Annisa Riski Amnan, Herman Sjahruddin, & Hardiani (2019) meneliti tentang “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa”. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda memberikan bukti bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa. Alokasi dana desa merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja desa.

Sitiana Muslikah , Sulistyو & Rita Indah Mustikowati (2020) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pad), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan menggunakan spss menghasilkan secara silmutan pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, secara parsial pendapatan asli desa serta alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan dan jumlah penduduk memperkuat pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan.

Perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan yang berguna untuk mengetahui hasil temuan yang jika diterapkan pada kondisi lingkungan dan waktu yang berbeda, karena dalam fenomena di atas dan juga penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Desa dengan menggunakan periode waktu dan obyek yang berbeda dari penelitian sebelumnya , sehingga akan memberikan hasil penelitian yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa. Perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan untuk melengkapi penelitian

terdahulu mengenai Belanja Desa yang pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variable Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Keuangan APBD Dan Belanja Desa.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya pada populasi, waktu dan sampel yang digunakan yaitu Pada Desa Di Kabupaten Sidoarjo. Dari uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA DESA (DD), DAN BANTUAN KEUANGAN APBD TERHADAP BELANJA DESA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh Terhadap Belanja Desa?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa (DD) berpengaruh Terhadap Belanja Desa?
3. Apakah Bantuan Keuangan APBD berpengaruh Terhadap Belanja Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengalaman yang lebih mendalam tentang Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa.

2. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yaitu mengembangkan mengenai Belanja Desa.

3. Bagi Pemerintahan Desa Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bantuan Keuangan APBD supaya Belanja Desa dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menguraikan secara sistematis hasil-hasil penelitian yang didapat dari peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian saat ini. Dalam bagian ini dijelaskan objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu, tujuan penelitian, serta hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi melalui perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu, penelitian tersebut antara lain:

1. Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab (2021)

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa”

Tujuan, -Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa pada desa di Kabupaten Sidoarjo. Desain/Methodologi/Pendekatan - Menggunakan 78 Desa di Kabupaten Sidoarjo. Pengujian analisis data menggunakan SPSS dalam menentukan adanya pengaruh ataupun tidak pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Temuan penelitian - Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Aloksi Dana Perimbangan Desa di Desa-desa Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 berpengaruh positif terhadap Belanja Desa. Orisinalitas/nilai - Hasil penelitian ini memiliki nilai tambah yang berkontribusi dalam memperkuat konsep pengaruh

pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa, baik secara parsial maupun simultan.

2. Alifa Fauzia Ma'ruf Dan Andy Dwi Bayu Bawono (2019)

“Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr) Terhadap Belanja Kesehatan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) untuk alokasi desa sehat pengeluaran di Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan Jumlah Penduduk Miskin sebagai pemoderasi variabel. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan menambahkan Total Jumlah Penduduk Miskin sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Wonosobo dan diperoleh 227 desa sebagai sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Studi ini memperoleh data melalui website Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan data dari fiscal tahun 2019 dan data sekunder dari Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan data tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DD berpengaruh terhadap Pengeluaran Kesehatan, sedangkan ADD dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Kesehatan. Namun, Jumlah Orang Miskin memiliki berpengaruh negatif sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara ADD dan Kesehatan Pengeluaran, tetapi tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara DD dan Pengeluaran Kesehatan

dan juga tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara BHPR dan Belanja Kesehatan.

3. Miki Indika , Yayuk Marliza , Aulia Marisa (2022)

“Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara”

Tujuan penelitian untuk mengetahui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. operasional variabel penelitian ini adalah Dana Desa (X1), Alokasi Dana Desa (X2) dan Belanja Desa (Y) Teknik analisa dengan regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $13,046 > 2,920$ dengan nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a (hipotesis alternative) diterima. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai hasilnya menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $13,046 > 2,920$ dengan nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a (hipotesis alternative) diterima. Berdasarkan hasil regresi secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Dana Desa (X1) dan Alokasi Dana Desa (X2) secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $216,718 > 19,00$ dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a

ditetima (Hipotesis alternative diterima). Hasil uji koefisien determinasi (R^2), dimana Nilai dari koefisien determinan Adjusted R Square (R^2) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel dependen Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4. Raa'ina Syahdzat Taen, Dan Elan Eriswanto (2022)

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa dana desa dan alokasi dana desa pada belanja desa. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan 9 desa di kecamatan Palabuhanratu i tahun 2017-2021. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45. Ini penelitian diambil sampelnya menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS perangkat lunak. Berdasarkan hasil analisis SPSS dapat diketahui desa asli pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran desa. Namun dana desa dan dana desa alokasi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa di desa-desa di kecamatan Palabuhanratu.

5. Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, & Hardiani (2019)

“Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan desa selama tahun 2016-2018 pada 4 desa yang menjadi sampel di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda memberikan bukti bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa. Alokasi dana desa merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja desa.

6. Sitiana Muslikah , Sulistyو & Rita Indah Mustikowati (2020)

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pad), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi”

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk menguji dan menjelaskan bagaimana pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel moderating. Jumlah sampel sebesar 12 desa yang mana peneliti mengambil 5 tahun anggaran APBDes yaitu tahun anggaran 2015-2019, dan peneliti menggunakan metode pengambilan sampel non purposive sampling. Variabel yang digunakan peneliti yaitu pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa sebagai variabel independen, belanja desa bidang pendidikan sebagai variabel dependen, dan jumlah penduduk miskin sebagai variabel moderasi. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti

yang dilakukan menggunakan spss menghasilkan secara silmutan pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, secara parsial pendapatan asli desa serta alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan dan jumlah penduduk memperkuat pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan.

7. Istiqomah Nur Isnaini (2020)

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa) , Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (Bhpr) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2018)”

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten. 2) Menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten. 3) Menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten. 4) Menganalisis pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten. 5) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian

eksplanasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah quota sampling, sehingga jumlah keseluruhan yang didapatkan berjumlah 80 Desa. Namun didapatkan data yang terkena outlier mengakibatkan jumlah sampel berjumlah 72 Desa. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan bantuan program IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 2) Dana Desa (DD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 3) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan 5) Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten tahun 2018.

8. Bramudya Wisnu Wardhana (2017)

“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa

Bidang Pertanian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Bagian Pemerintah Desa yang terdapat dalam Laporan Keuangan Desa Tahun anggaran 2016. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yang merupakan metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, dimana kriteria sampel yang digunakan adalah Desa-desanya se-Kabupaten Sukoharjo yang sudah mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai pada bulan Desember 2016. Dengan 123 data dianalisis dengan metode regresi linear berganda program SPSS 21.00. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.

9. Reina Shafira Murti (2018)

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Bagi Hasil Pajak Retribusi (Bhpr) Danjumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)”

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Sawah terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 251 desa. Penelitian ini menggunakan

data sekunder dimana data diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang tertentu. Diperoleh sampel 208 desa yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda program SPSS 16.00. Hasil penelitian ini diperoleh angka koefisien determinasi dengan Adjusted R square sebesar 0,054 atau 5,4%. Hal ini berarti bahwa variabel Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian dapat dijelaskan oleh variabel PADesa, DD, ADD, BHPR, dan JML_SWH (jumlah sawah), sedangkan sisanya 94,6% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar variabel yang diteliti. ADD mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Sedangkan PADesa, DD, BHPR, dan Jumlah Sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi belanja Desa Bidang Pertanian.

10. Anggun Alim Mumpuni (2021)

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sragen Tahun 2019)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sragen tahun 2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Sragen. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil pada penelitian ini menunjukkan

bahwa secara simultan PADesa, DD, dan ADD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa PADesa dan ADD tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

11. Ayu Miftakhul Janah (2018)

“Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa (Padesa), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Dana Desa (Dd) Terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)”

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan dana desa terhadap belanja desa serta untuk mengetahui terjadi flypaper effect dalam pengelolaan keuangan Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling sehingga diperoleh Sampel sebanyak 220 desa yang telah dianalisis. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri melalui Bagian Pemerintah Desa yang terdapat dalam laporan Keuangan Desa tahun anggaran 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda program SPSS 24.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli desa, alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa serta

terjadi flypaper effect pada pengelolaan keuangan di desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017.

12. Novemia Nanda Yuliawati (2019)

“Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Pendapatan Asli Desa (Pades), Dan Bantuan Keuangan Apbd Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji : (1) dan menguji pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap belanja desa bidang pembangunan desa, (2) pengaruh Dana Desa terhadap belanja desa bidang pembangunan desa, (3) pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap belanja desa bidang pembangunan desa, (4) pengaruh Bantuan Keuangan APBD terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Metode Penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah desa di Kabupaten Pacitan. Jumlah populasi adalah 163 desa, penelitian ini menggunakan kriteria kelengkapan data, terdapat 146 desa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa 2) Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang Pembangunan Desa 3) Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. 4) Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

13. Edo Pramukti (2020)

“Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa Pendapatan Asli Desa, Dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Kota/Kabupaten dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum (Studi Empiris di Seluruh Desa SeKabupaten Sukoharjo Tahun 2018). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan melakukan penarikan sampel yang didasarkan pada tujuan penelitian dan kriteria yang telah ditetapkan sebesar 94 Desa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap belanja desa bidang pekerjaan umum dengan nilai negatif sebesar - 0,620 dan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$. Bantuan Keuangan Kota/Kabupaten berpengaruh terhadap Belanja Desa dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,555 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

14. Agustina Ika Widyawati (2022)

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso Tahun 2020 – 2021”

Setiap desa memiliki pengeluaran Belanja Desa yang berbeda-beda. Setiap tahun Belanja Desa mengalami kenaikan tetapi masih terdapat pembangunan yang tertunda

karena dana dari desa yang tidak cukup untuk melakukan pembangunan. Belanja Desa juga banyak digunakan dalam bidang pembangunan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa terhadap Belanja Desa. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Rejoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian yang bersifat asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Rejoso tahun 2020-2021 yang berjumlah 24 desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Nonprobability Sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah data panel menggunakan STATA 16. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa, dan Dana Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa. Selanjutnya secara simultan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.

15. Tito Marta Sugema Dasuki (2020)

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka”

Semua desa di Indonesia khususnya di Kabupaten Majalengka masih bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah, karena pendapatan asli desa yang diperoleh masing-masing desa masih kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan desa kemandirian masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

desa pendapatan asli dan alokasi anggaran desa ke belanja desa. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli desa dan desa alokasi anggaran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengeluaran desa. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Populasi yang digunakan pada tahun 318 data laporan desa di siskedes. Dengan menggunakan Cluster sampling, dalam penelitian ini digunakan 100 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa tersebut asli pendapatan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dan anggaran desa alokasi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Desa serentak pendapatan asli dan alokasi anggaran desa berpengaruh signifikan terhadap desa pembelanjaan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	. Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dana Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Desa-desa Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019 berpengaruh positif	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunakan objek

		terhadap Belanja Desa. Orisinalitas/nilai - Hasil penelitian ini memiliki nilai tambah yang berkontribusi dalam memperkuat konsep pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa terhadap belanja desa, baik secara parsial maupun simultan.	3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021 4. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10% 5. Responden yang di tuju berbeda
2	Alifa Fauzia Ma'ruf Dan Andy Dwi Bayu Bawono (2019) "Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr) Terhadap Belanja Kesehatan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019)"	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DD berpengaruh terhadap Pengeluaran Kesehatan, sedangkan ADD dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Kesehatan. Namun, Jumlah Orang Miskin memiliki pengaruh negatif sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara ADD dan Kesehatan	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021

		<p>Pengeluaran, tetapi tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara DD dan Pengeluaran Kesehatan dan juga tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara BHPR dan Belanja Kesehatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Responden yang di tuju berbeda 5. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10% 	
3	<p>Miki Indika , Yayuk Marliza , Aulia Marisa (2022) “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara”</p>	<p>Berdasarkan hasil regerasi secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Dana Desa (X1) dan Alokasi Dana Desa (X2) secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh $F_{tabel} > 19,00$ dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a ditetima (Hipotesis alternative diterima). Hasil uji koefisien determinasi (R^2), dimana Nilai dari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021 4. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin

koefisien determinan Adjusted R Square (R²) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel dependen Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

dengan tingkat 10%

5. Responden yang di tuju berbeda

4	Raa'ina Syahdzat Taen, Dan Elan Eriswanto (2022) "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Palabuhanratu)"	Berdasarkan hasil analisis SPSS dapat diketahui pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran desa. Namun dana desa dan dana desa alokasi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa di kecamatan Palabuhanratu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun
---	--	---	--	--

			n data sama-sama menggunakan kuesioner	4. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%	5. Responden yang di tuju berbeda
5	Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, & Hardiani (2019) “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa”	Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda memberikan bukti bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa. Alokasi dana desa merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja desa.	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd dan Dana Desa (Dd) 2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021 4. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan	

				sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%
				5. Responden yang di tuju berbeda
6	Sitiana Muslikah , Sulistyو & Rita Indah Mustikowati (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pad), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi”	Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan menggunakan spss menghasilkan secara silmutan pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, secara parsial pendapatan asli desa serta alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan dan jumlah penduduk memperkuat pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner 4. Sama-sama menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021 4. Responden yang di tuju berbeda

		desa	bidang		
		pendidikan.			
7	Istiqomah Nur Isnaini (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa) , Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Retribusi (Bhpr) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2018)”	Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 2) Dana Desa (DD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 3) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan 5) Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap	1) Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2) Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3) Teknik pengumpul an data sama- sama menggunakan kuesioner	1. Penelitian sekarang menambahk an variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunaka n objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbaru i tahun penelitian yaitu tahun 2021 4. Responden yang di tuju berbeda 5. Penelitian sekarang menggunaka n Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%	

Belanja Desa
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan di
Kabupaten Klaten
tahun 2018.

8	Bramudya Wisnu Wardhana (2017) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021 4. Responden yang di tuju berbeda 5. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%
9	Reina Shafira Murti (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli	Hasil penelitian ini diperoleh angka koefisien determinasi dengan	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel

	Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Bagi Hasil Pajak Retribusi (Bhpr) Dan jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)”	Adjusted R square sebesar 0,054 atau 5,4%. Hal ini berarti bahwa variabel Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian dapat dijelaskan oleh variabel PADesa, DD, ADD, BHPR, dan JML_SWH (jumlah sawah), sedangkan sisanya 94,6% dijelaskan oleh faktor faktor diluar variabel yang diteliti. ADD mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pertanian. Sedangkan PADesa,DD,BHPR, dan Jumlah Sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi belanja Desa Bidang Pertanian.	Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa	2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS	3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	Bantuan Keuangan Apbd	2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo	3. Penelitian sekarang memperbaiki tahun penelitian yaitu tahun 2021	4. Responden yang di tuju berbeda	5. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%
10	Anggun Mumpuni (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja	Alim Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PADesa, DD, dan ADD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa	Hasil pada ini secara PADesa, DD, dan ADD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd),			1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd		2. Penelitian sekarang	

	Desa Pemberdayaan Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sragen Tahun 2019)”	Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa PADesa dan ADD tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dan Belanja Desa	2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021 4. Responden yang di tuju berbeda 5. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%
11	Ayu Miftakhul Janah (2018) “Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa (Padesa), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Dana Desa (Dd) Terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli desa, alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa serta terjadi flypaper effect pada pengelolaan keuangan di desa-desa Se-Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017.	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian	

				sama menggunakan kuesioner	4. Responden yang di tuju berbeda	yaitu tahun 2021
					5. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%	
12	Novemia Nanda Yuliawati (2019)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembangunan Desa 2) Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang Pembangunan Desa 3) Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembangunan Desa. 4) Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap	Penelitian	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Bantuan Keuangan Apbd Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	1. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 2. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021 3. Responden yang di tuju berbeda 4. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%	

			pembangunan desa.		
13	Edo Pramukti (2020) “Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap belanja desa bidang pekerjaan umum dengan nilai negatif sebesar -0,620 dan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$. Bantuan Keuangan Kota/Kabupaten berpengaruh terhadap Belanja Desa dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,555 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Bantuan Keuangan Apbd Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS 3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	1. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo 2. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021 3. Responden yang di tuju berbeda 4. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%	
14	Agustina Ika Widyawati (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso Tahun 2020 – 2021”	Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa, dan Dana Desa berpengaruh	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa 2. Teknik analisis data sama-sama	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd 2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo	

		signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa. Selanjutnya secara simultan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.	3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	4. Sama-sama menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%	3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021	4. Responden yang di tuju berbeda			
15	Tito Marta Sugema Dasuki (2020) "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa tersebut pendapatan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa dan anggaran desa alokasi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Desa serentak pendapatan asli dan anggaran desa berpengaruh signifikan terhadap desa pembelanjaan	1. Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Belanja Desa	2. Teknik analisis data sama-sama menggunakan SPSS	3. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan kuesioner	1. Penelitian sekarang menambahkan variabel Bantuan Keuangan Apbd	2. Penelitian sekarang menggunakan objek Kabupaten Sidoarjo	3. Penelitian sekarang memperbarui tahun penelitian yaitu tahun 2021	4. Responden yang di tuju berbeda

5. Penelitian sekarang menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu rumus slovin dengan tingkat 10%

Sumber Data: Penelitian Terdahulu

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Landasan Teori

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan atau dasar yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Desa

Desa adalah kesatuan hukum masyarakat, dengan tatanan asal yang khusus berdasarkan hak asal usul. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa mengenai "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan mas" Desa adalah satu kesatuan hukum dimana masyarakat bertempat tinggal "pemerintahan sendiri" dimana masyarakat bertempat tinggal "pemerintahan sendiri" (Hasan & Tanesab, 2021).

Secara historis, pemerintah desa mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi aspek-aspek lain dari perbedaan dalam kehidupan

masyarakat, sering kali hukum adat tertulis atau tidak tertulis hukum adat, Sosial budaya masyarakat, ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, keamanan, dan pertahanan diri, serta pemerintah, dibentuk dengan memilih anggota masyarakat tertentu yang dapat. Pemerintah desa merupakan organisasi formal desa kelembagaan masyarakat. Kebutuhan dan kewenangan masyarakat desa adalah keberadaan pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tentang pemerintahan desa setempat, pengelolaan desa adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam satu kesatuan system pemerintah Negara kesatuan republic Indonesia.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 1 angka 9 dengan berbunyi "Alokasi Dana Desa merupakan perimbangan dana diterima kabupaten/kota dalam APBD, dikurangi Alokasi Dana Khusus (DAK)" (Ma'ruf & Bawono, 2019).

a. Pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015

Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 menjadi PP 47 Tahun 2015 Besaran alokasi dana desa diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 sebagaimana peraturan pelaksanaan Undang-undang (UU) desa yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk alokasi dana desa (ADD)

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk alokasi dana desa (ADD) setiap tahun anggaran.

- 2) Alokasi dana desa (ADD) sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang siltap dan tunjangan desa dibiayai dari sumber dana alokasi dana desa mengalami perubahan kedua menjadi penggunaan alokasi dana desa mengalami perubahan kedua menjadi penggunaan alokasi dan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019.

c. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, definisi keuangan desa tidak berubah masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tidak semua isi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa akan dilakukan perubahan melalui permendagri nomor 20 tahun 2018. Azas Pengelolaan Keuangan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

- 1) Desa keuangan dikelola oleh asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan anggaran.

- 2) APBD merupakan dasar keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

- 1) Pelatihan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan dalam kepemilikan kekayaan.
- 2) Kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan kekuasaannya kepada perangkat desa selaku pelaksanaan pengelolaan keuangan desa selaku pelaksana (PPKD).
- 3) Pelimpahan akan ditetapkan dengan keputusan kepala desa sebagai kekuasaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PKPD) kepada PPKD terdiri dari:
 - a. Sekretaris desa
 - b. Kaur dan kasi
 - c. Kaur keuangan

Pembinaan dan Pengawasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

- 1) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, menteri dibina dan dibina oleh direktur departemen pembangunan pemerintah rakyat dan inspektur jenderal kementerian dalam negeri.

- 2) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana di tingkat desa, pajak di beberapa daerah, SPT kabupaten/kota dan bantuan keuangan ke desa.
- 3) Bupati/Walikota berkoordinasi dengan APIP kabupaten/kota untuk pembinaan dan pengawasan.

Format laporan tanggung jawab akuntansi keuangan desa meliputi:

1. Laporan keuangan terdiri dari laporan implementasi APBD.
2. Realisasi kegiatan, dan
3. Daftar program dapaertemen dan program regional dan program lainnya.

d. Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana pedesaan khusus yang diokasikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah (kabupaten) (Taen & Eriswanto, 2022). Tujuan utamanya adalah menjaga agar pembangunan di tingkat desa tetap pada jalurnya, termasuk pengadaan material dan tenaga kerja.

Tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah tujuan yang terlampirkan dalam peraturan menteri nomor 37 tahun 2007 pada pasal 19 (Amnan et al., 2019). Selain itu, tujuan utama penyaluran dana tingkat desa (ADD) yang dilampirkan dalam pedoman pelaksanaan dana tingkat desa dan petunjuk teknis tahun 2014 adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelola desa. peningkatan kualitas dan pelaksanaan pembangunan

desa. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan alokasi dana desa (ADD) (Muslikah et al., 2020) adalah:

- 1) Meningkatkan kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kelembagaan masyarakat desa kemampuan mengendalikan pembangunan dan menggunakan metode partisipatif sesuai potensi desa
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan peluang usaha masyarakat pedesaan
- 4) Meningkatkan kemandirian masyarakat desa

e. Manfaat alokasi dana desa (ADD)

Menurut (Murti, 2018), pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus mengalokasikan 10% dari anggaran untuk meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan dan desa yang berkeadilan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, dan Pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah alat untuk distribusi desa.

- 1) Saat memotong 10% dana alokasi, kesejahteraan desa diperkirakan akan menjadi kenyataan.
- 2) Menciptakan pembangunan yang berkeadilan melalui dana APBD daerah provinsi, khususnya di pedesaan. Pemerintah pusat akan

mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk pedesaan, mendorong pelaksanaan otonomi desa, dan memperdayakan pemerintah desa dan masyarakat desa dan pada akhirnya menciptakan peningkatan pembangunan dari pedesaan, terutama dari pedesaan.

- 3) Mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk aktif menyelenggarakan pembangunan desa.

3. Dana Desa (DD)

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Mumpuni, 2021).

Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Yulawati, 2019). Dana desa sebagaimana yang dimaksud di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik

di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamankan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

b. Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan (Widyawati, 2022).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal yang telah di amandemen pada Peraturan Pemerintah yang telah di pertimbangkan dan di rumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa di alokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- 1) Alokasi dasar.

- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

c. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes, seperti yang terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.1

Mekanisme Transfer APBN Dana Desa

Sumber : (Wardhana, 2017)

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran

penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tahap I berupa:

- a) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.

2) Tahap II berupa:

- a) Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya.

3) Tahap III berupa

- a) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II.
- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II.

Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa.
- 2) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.

- 3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa samapai dengan tahap II dari kepala desa.

d. Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- 4) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang yang memadai.

Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan

belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDesa, rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa (Pramukti, 2020).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- d) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya desa dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang dan desa maju atau mandiri.

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk program dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau dukungan BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*).
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.

- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

4. Bantuan Keuangan APBD

a. APBD

Diambil dari kementerian pendidikan dan kebudayaan administrasi umum kebudayaan, APBD merupakan salah satu perangkat kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Permendagri Nomor 64 tahun 2020, memutuskan menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 (Langi, 2022).

Pasal 1

1. Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan keuangan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan daerah tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Pedoman penyusunan APBD merupakan pokok-pokok kebijakan pemerintah daerah sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan, pembahasan dan pengaturan APBD.

Pasal 3

- 1) Dokumen penciptaan anggaran dalam persiapan APBD untuk tahun 2021 dituangkan ke dalam format berikut:
 - a. APBD dan Periorita sementara dan kebijakan atap anggaran.
 - b. Perencanaan anggaran untuk unit-unit kerja bagian.
 - c. Proyek regulasi daerah APBD.
 - d. Draf peraturan kepala daerah pada inspeksi APBD.
 - e. APBD perubahan kebijakan umum dan prioritas dan penggantian anggaran sementara PLAFAs
 - f. Kontrol regional APBD perubahan
 - g. Peraturan daerah pada pemeriksaan perubahan APBD
 - h. Penghapusan peraturan kepala lokal di APBD.
- 2) Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan di tingkat menteri.

Pasal 4

- 1) Kebijakan umum dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf a, dan pendapatan batas anggaran sementara diatur dalam rencana kerja pemerintah daerah.

- 2) Dalam hal rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan ketentuan klasifikasi, kodifikasi, dan denominasi fiskal, pemerintah daerah hasil peninjauan, Rencana dan kegiatan pemetaan.
- 3) Hasil survey dan pemetaan rencana dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021.
- 4) Hasil pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan pos-pos kebijakan umum APBD dan pos-pos prioritas serta pos anggaran maksimum sementara.

Pasal 5

1. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan pandemic virus corona 2019 untuk mempersiapkan anggaran tahun anggaran 2021. Prioritasnya adalah sebagai berikut:
 - a) Perawatan medis dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan
 - b) Menyediakan jarring pengaman social/ *social safety net*, dan
 - c) Mengelola dampak ekonomi, terutama menjaga vitalitas BUMD masing-masing.
2. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan adaptasi keselamatan produktif baru terhadap penyakit virus corona 2019 di pemerintah daerah.

3. Memperhatikan pelaksanaan protocol 2019 untuk mencegah penyebaran penyakit virus corona. Dalam tahap persiapan dan pembahasan penetapan anggaran tahun anggaran 2021.
4. Penerapan protokol pencegahan penularan corona virus disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan dasar pengajuan status daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa unsur APBD, yaitu:

- a. Dengan detail rencana kegiatan yang direncanakan.
- b. Ada sumber persetujuan yang merupakan target minimum untuk menutupi biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- c. Ada biaya yang merupakan biaya maksimum dari biaya yang diimplementasikan.
- d. Jenis kegiatan dan proyek yang dijelaskan dalam bentuk angka.
- e. Periode anggaran yang biasanya setahun.

Misi APBD adalah menjadi pedoman pemerintah daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam hal penerimaan dan belanja. Berikut adalah beberapa tujuan APBD, antara lain:

- a) Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya.
- b) pengaturan atau kordinasi di lingkungan pemerintah
- c) Memulai efisiesnsi di bidang distribusi barang dan jasa.
- d) Penetapan prioritas bagi pemerintah daerah belanja.

b. Bantuan Keuangan APBD

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD (Yuliatwati, 2019). Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. Ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun anggaran ini meliputi:

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat
- b. Prinsip Penyusunan APBD
- c. Kebijakan penyusunan APBD
- d. Menyusun kebijakan. Persiapan teknis APBD
- e. Hal khusus lainnya.

5. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, seperti peraturan menteri dalam negeri. Tentunya, belanja desa harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan

desa yang diperoleh, yang akhirnya belanja desa ini dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa (Muslikah et al., 2020). Realisasi belanja desa terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

Belanja desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Amnan et al., 2019).

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam hal ini sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. Dalam pasal 74 bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ketentuan belanja desa sangat umum dan tidak ada batas maksimum maupun minimum untuk alokasi tertentu. Ketentuan seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Konsekuensi positifnya desa mempunyai keleluasaan untuk merencanakan pengalokasian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, sedangkan potensi konsekuensi negatif bisa terjadi dalam bentuk rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dalam postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa (kepala desa, perangkat desa dan BPD) dibandingkan kebutuhan warga. Dengan model ketentuan seperti ini, maka alokasi belanja di APBDes tergantung pada dinamika politik anggaran desa (Taen & Eriswanto, 2022).

2.3 Hubungan Antar Variabel

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa

Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa ini dapat

mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Jadi semakin tinggi nilai alokasi dana perimbangan desa maka nilai belanja desa juga akan naik.

Penelitian yang dilakukan oleh ((Hasan & Tanesab, 2021); (Indika et al., 2022) ; (Taen & Eriswanto, 2022); (Amnan et al., 2019); (Muslikah et al., 2020); (Murti, 2018); (Mumpuni, 2021); (Janah, 2018); (Yuliawati, 2019); (Pramukti, 2020); (Widyawati, 2022); (Dasuki, 2020)) menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ((Ma'ruf & Bawono, 2019); (Wardhana, 2017)) menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Desa.

2. Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa

Pemerintah pusat memberikan dana desa secara umum dengan prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa yang ditransfer pemerintah

pusat kepada pemerintah desa harus sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa bila dana desa mengalami kenaikan maka nilai belanja desa juga akan naik.

Penelitian yang di lakukan oleh ((Hasan & Tanesab, 2021); (Ma'ruf & Bawono, 2019); (Indika et al., 2022) ; (Taen & Eriswanto, 2022); (Muslikah et al., 2020); (Mumpuni, 2021); (Janah, 2018); (Yuliawati, 2019); (Widyawati, 2022)) menyatakan bahwa Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ((Wardhana, 2017); (Murti, 2018)) menyatakan bahwa Dana Desa tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Desa.

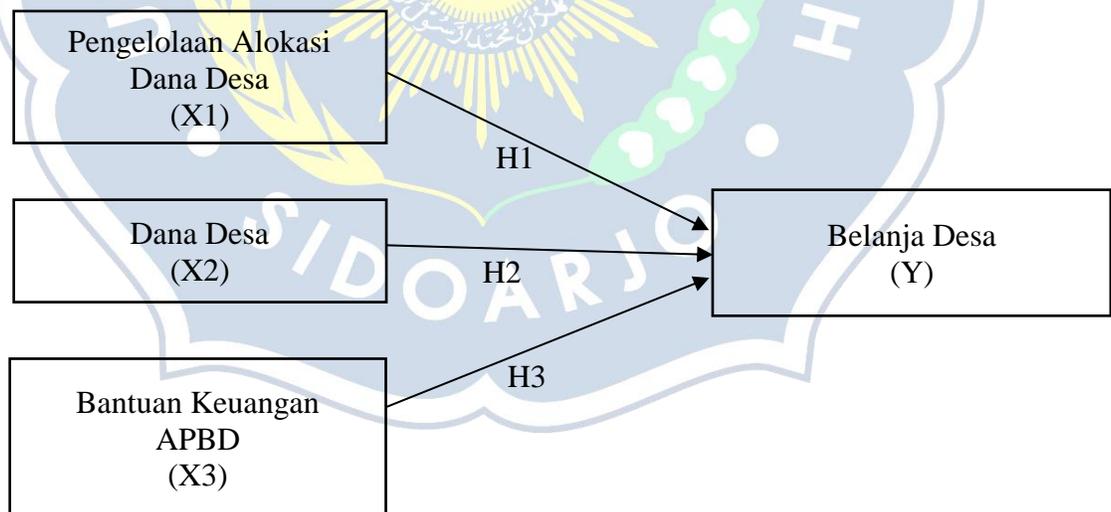
3. Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa

Peranan Bantuan Keuangan APBD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan untuk meringankan proses pendanaan program kerja pemerintah desa, akan tetapi tiap tahunnya memiliki anggaran yang berbeda di karenakan bantuan keuangan APBD kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa. alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh ((Yuliawati, 2019); (Pramukti, 2020); menyatakan bahwa Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual pada penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang menguji Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa, sehingga tersusunlah kerangka konseptual yakni:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban teori sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan juga sebagai jawaban sementara. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang di ajukan adalah :

H1 : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa

H2 : Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa

H3 : Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

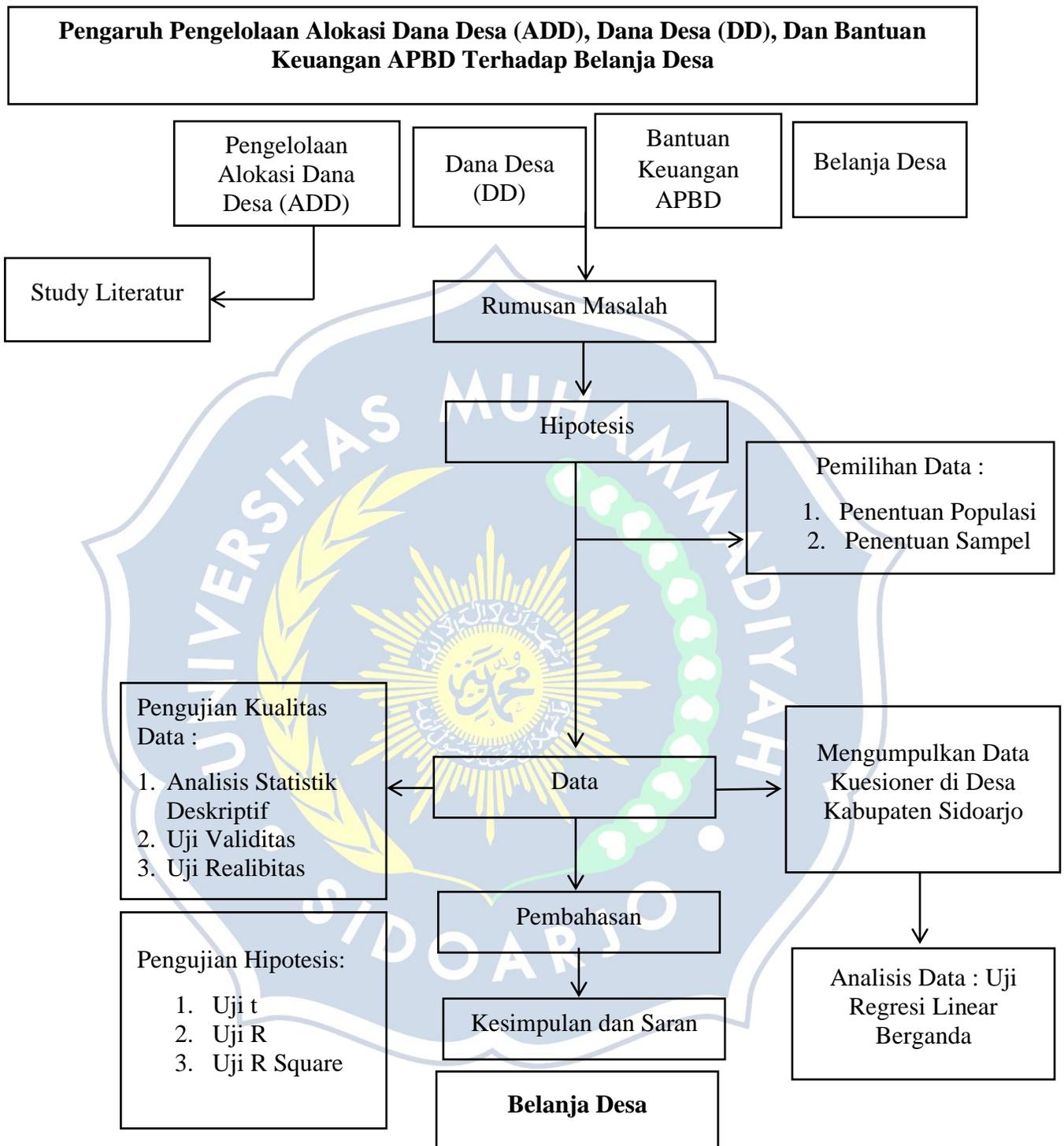
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian, sehingga kesimpulan dan hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan, baik pengumpulan data, analisa data maupun kesimpulan. Berhasil tidaknya suatu penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tepat, relevan dan objektif, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer sebagai sumber data, karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistic (Mustakini, 2014). Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan mengembangkan teori serta hipotesis yang berkaitan dengan dengan fenomena alam yang terjadi.

3.2 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif serta menggunakan pengujian hipotesis untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Sebagai langkah awal peneliti mencari acuan studi literature dari jurnal, artikel, maupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Bantuan Keuangan APBD Dan Belanja Desa. Tahap kedua dan selanjutnya peneliti menetapkan rumusan masalah, menentukan hipotesis, dan data-data yang akan diperlukan. Pengumpulan

data berasal dari data primer dan sekunder. data primer berasal dari kuesioner yang di bagikan kepada responden sedangkan data sekunder berupa data historis yang diperoleh dari berbagai sumber melalui media perantara. Data sekunder tersebut meliputi buku referensi, literature, laporan keuangan dan informasi mengenai Belanja Desa.





Gambar 3.1

Rancangan Penelitian

3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur).

3.4 Definisi Operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator Variabel

a. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian.

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1) Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah **Belanja Desa**. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa di pergunakan dalam rangka mendanai penyelenggara kewenangan desa. realisasi belanja desa terdiri atas; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Indikator Belanja Desa menurut (Langi, 2022):

- a) Belanja Desa merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun

- b) Kegunaan belanja desa sesuai dengan realisasi di desa
- c) Kegunaan belanja desa sesuai Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014

2) Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Bantuan Keuangan APBD.**

a) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut (Indika et al., 2022), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

Indikator Alokasi Dana Desa (ADD) menurut (Indika et al., 2022) :

1. Alokasi Dana Desa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat
3. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan

4. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial
5. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
7. Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

b) Dana Desa (DD)

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepala desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Ghozali, 2019).

Indikator Dana Desa Menurut (Taslim, 2021):

- 1) Pengelolaan dana desa
- 2) Perencanaan
- 3) Pelaksanaan
- 4) Penatausahaan
- 5) Pelaporan
- 6) Pertanggungjawaban Dana Desa

c) Bantuan Keuangan APBD

Bantuan Keuangan APBD merupakan dana yang dihasilkan dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah desa sesuai dengan prosentasi dari hasil kekayaan alam yang dikelola dan pajak yang diterima oleh pemerintah desa, akan tetapi di Kabupaten Pacitan, pembagian Bantuan Keuangan APBD menggunakan metode bagi rata sehingga tidak ada variasi pengaruh besaran bagi hasil pajak dan retribusi ini terhadap belanja bidang pembangunan desa.

Indikator Bantuan Keuangan APBD menurut (Langi, 2022):

- 1) Peranan Bantuan Keuangan APBD
- 2) Bantuan Keuangan APBD memiliki anggaran yang berbeda
- 3) Bantuan Keuangan APBD diarahkan untuk percepatan pembangunan desa
- 4) Peran bantuan keuangan APBD sangat berpengaruh dalam setiap program kerja desa

b. Identifikasi Variabel

Identifikasi variabel pada penelitian ini bertujuan untuk memahami seputar variabel yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini bersifat kausalitas yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat untuk menganalisis pengaruh antara tiga 3 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat, dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel.

Menurut Sugiyono (2016) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variable Alokasi Dana Desa (ADD) (X_1), Dana Desa (DD) (X_2), dan Bantuan Keuangan APBD (X_3). Variabel terikat atau disebut dengan variabel dependen yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sekaran & Bogie, 2017). Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Belanja Desa (Y).

c. Indikator Variabel

Tabel 3.1

Indikator Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran	Sumber
----	----------	------------	------------------	--------

1	Alokasi Dana Desa (ADD) (X ₁)	1. Alokasi Dana Desa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 2. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat 3. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan 4. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial 5. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 6. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat 7. Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendorong peningkatan	Skala Likert	(Zakiyah, 2015); (Langi, 2022); (Pramukti, 2020); (Ghozali, 2019); (Ma'ruf & Bawono, 2019); (Indika et al., 2022)
---	---	---	--------------	---

		keswadayaan dan gotong royong masyarakat		
		8. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)		
2	Dana Desa (DD) (X ₂)	1) Pengelolaan dana desa 2) Perencanaan 3) Pelaksanaan 4) Penatausahaan 5) Pelaporan 6) Pertanggungjawaban Dana Desa	Skala Likert	(Taslim, 2021); (Riyani, 2016); (Tenriwaru & Nurwanah, 2022); (Tenriwaru & Nurwanah, 2022); (Boedijono et al., 2019); (Hasan & Tanesab, 2021); (Ghozali, 2019)
3	Bantuan Keuangan APBD (X ₃)	1) Peranan Bantuan Keuangan APBD 2) Bantuan Keuangan APBD memiliki anggaran yang berbeda 3) Bantuan Keuangan APBD diarahkan untuk percepatan pembangunan desa 4) Peran bantuan keuangan APBD sangat berpengaruh dalam setiap program kerja desa	Skala Likert	(Langi, 2022); (Yuliawati, 2019)
4	Belanja Desa (Y)	a) Belanja Desa merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun b) Kegunaan belanja desa sesuai dengan realisasi di desa c) Kegunaan belanja desa sesuai Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014	Skala Likert	(Langi, 2022); (Pramukti, 2020); (Hasan & Tanesab, 2021); (Ma'ruf & Bawono, 2019); (Indika et al., 2022); (Taen & Eriswanto, 2022); (Amnan et al., 2019)

Sumber Data: Penelitian Terdahulu

3.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2013). Jadi yang dimaksud populasi adalah seluruh individu yang akan dijadikan obyek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ghozali, 2018). Populasi dari penelitian ini adalah pemerintahan desa kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 322 desa dan 31 kelurahan sehingga total populasinya adalah 353.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan standar eror 10%. Rumus Slovin adalah Suatu sistem matematis yang digunakan untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara pasti. Rumus slovin ini juga biasa digunakan jika populasi objek yang diteliti sangat luas. Sehingga dengan hasil $n = N/1 + N.e^2 = 353/1 + 353.0,1^2 = 100$ desa yang dijadikan sampel. Setiap desa di berikan 3 kuesioner, karakteristik pembagian kuesioner di berikan kepada responden yang berhubungan dengan dana desa di antaranya Kepala Desa, Kaur Pembangunan, dan Kaur Keuangan. Sehingga, jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $3 \times 100 = 300$ data.

3.6 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, data kuantitatif adalah data penelitian yang berupa angka yang di analisis dengan menggunakan statistik (Sugiyono, 2016). Data yang diperoleh dari penelitian ini juga berupa data kualitatif karena beberapa informasi menerangkan dalam bentuk uraian dimana data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka melainkan penjelasan yang menggambarkan keadaan, pendapat, persepsi dan diukur secara tidak langsung.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Sugiyono, 2016b). Dalam Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis, antara lain:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017).

Data primer pada penelitian ini berasal dari data responden mengenai variabel Alokasi Dana Desa (ADD) (X_1), Dana Desa (DD) (X_2), Bantuan Keuangan APBD (X_3) dan Belanja Desa (Y) Pada Desa di Kabupaten Sidoarjo.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari Desa di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi struktur organisasi, profil desa, dan visi misi.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertulis untuk pengumpulan data yang diperlukan, tidak melalui wawancara terhadap responden karena responden khawatir identitasnya akan terungkap. Kuesioner tersebut berisi daftar pernyataan yang telah dibuat dan disusun oleh peneliti yang selanjutnya akan diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner tersebut bersifat tertutup, yang berarti bahwa responden tidak bisa memberikan jawaban atau pendapat sendiri melainkan cukup memilih jawaban yang telah tersedia.

Pada penelitian ini menggunakan 5 poin skala *likert*, untuk menghilangkan sifat keragu-raguan responden dalam memberikan jawaban pada kuesioner. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek atau fenomena tertentu (Syofian, 2014).

Adapun untuk keperluan analisis kuantitatif, skor yang diberikan dari setiap skala sebagai berikut :

Tabel 3.2

Bobot Skor Jawaban Variabel

Pilihan Jawaban	Bobot Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak setuju	1

Sumber Data: (Syofian, 2014)

3.8 Teknik Analisis

a. Uji Validitas dan Realibitas

1) Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti (Agus, 2017). Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05 (5%). Jika hasil analisis menunjukkan lebih kecil dari pada nilai t tabel, maka item-item dalam kuesioner tidak menunjukkan nilai kevalidan sehingga tidak dapat dilanjutkan sebagai instrumen penelitian.

2) Uji Reliabilitas

Kata reliability berasal dari kata *rely* dan *ability*. Reliabilitas bisa diartikan sebagai kepercayaan, keterandalan, atau konsistensi. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, artinya memiliki konsistensi pengukuran yang baik (Ghozali, 2018). Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika nilai *CronbachAlpha* $> 0,60$ maka instrumen reliabel.
- b. Jika nilai *CronbachAlpha* $< 0,60$ maka instrumen tidak reliabel.

b. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami dalam menginterpretasikan hasil analisis data dan pembahasannya (Wahidmurni, 2017).

Alat analisis yang digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Mustakini, 2014). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Ukuran numerik ini merupakan bentuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah pada suatu penjelasan dan penafsiran.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah cara menganalisis data yang berbentuk angka yang dibandingkan antara yang satu dengan yang lain (Sugiyono, 2016b). Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan

uji statistik regresi linier berganda. Untuk menguji kebenaran dan hipotesis yang diajukan maka di uji dengan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Desa

a = Konstanta

X₁ = Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

X₂ = Dana Desa (DD)

X₃ = Bantuan Keuangan APBD

b₁ = koefisien regresi untuk variabel X₁

b₂ = koefisien regresi untuk variabel X₂

b₃ = koefisien regresi untuk variabel X₃

e = Error (variabel lain tidak dijelaskan)

d. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y). Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, dan uji t.

1. Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Sugiyono, 2017), Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variable bebas terhadap variable terikat. Apakah variable bebas berpengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variable

terikat. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menggunakan uji signifikan. Dengan ketentuan jika nilai signifikan harus lebih kecil dari 0,05 alpha, maka artinya terdapat alasan untuk hipotesis satu (H_1) diterima.

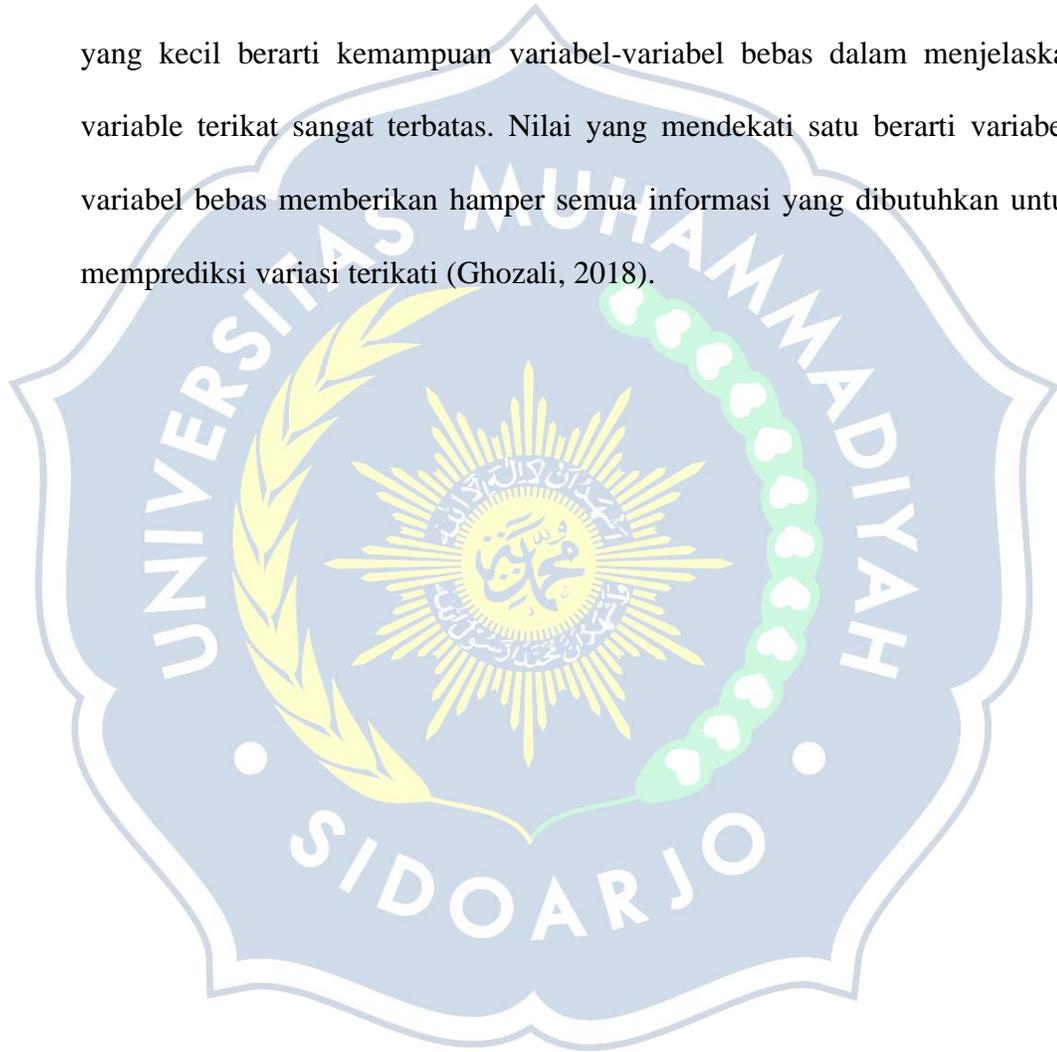
2. Koefisien Korelasi Berganda (R)

Koefisien korelasi berganda dipergunakan untuk menghitung tingkat keeratan hubungan antara variable bebas dengan variable terikat. Jangkauan nilai R berkisar antara 0-1, artinya semakin mendekati 1 maka semakin kuat hubungan antara variable bebas secara bersama-sama dan variable terikat. Semakin mendekati 0 berarti hubungannya semakin lemah atau bahkan tidak sama sekali antara variable bebas secara bersama-sama dan variable terikat.

Menurut Ghozali (2018), jika nilai R (korelasi) tersebut bernilai positif, artinya hal ini menandakan bahwa jika terjadi peningkatan nilai pada variable bebas, maka akan menyebabkan peningkatan nilai variable terikat, artinya terjadi hubungan yang searah antara variable bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tetapi jika nilai R (korelasi) tersebut bernilai negatif, maka hubungan yang terjadi adalah hubungan yang berbalik arah. Hubungan berbalik arah tersebut mengandung arti bahwa jika terjadi peningkatan nilai pada variable bebas secara bersama-sama maka akan menyebabkan penurunan nilai pada variabel terikat. Dan sebaliknya jika terjadi penurunan nilai pada variable secara bersama-sama maka akan menyebabkan peningkatan nilai pada variable terikat.

3. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Digunakan untuk menghitung kemampuan model regresi dalam menjelaskan perubahan variable yang tergantung akibat variasi variable bebas. Nilai koefisien determinasi berganda adalah antara nol dan satu (0-1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variable terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi terikat (Ghozali, 2018).



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sidoarjo (Jawa: Sidaharja; Madura: Siduwarjhâ) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sidoarjo Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Penduduk kabupaten ini berjumlah 2.033.764 jiwa pada tahun 2021.

Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan. Pada 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Sidokare dipimpin R. Notopuro (kemudian bergelar R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Ia adalah putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare yang memiliki konotasi kurang bagus diubah namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.827.064 jiwa dengan luas wilayah 634,38 km² dan sebaran penduduk 2.880 jiwa/km².

Tabel 4.1

Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Sidoarjo

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
35.15.12	Balombangendo		20	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Balombangendo • Bakalan Wringinpitu • Bakungpringgodani • Bakungtemenggungan • Bogempinggir • Gadungkepuhsari • Jabaran • Jeruklegi • Kedungsukodani • Kemangsen • Penambangan • Seduri • Seketi • Singkalang • Sumokebangsri • Suwaluh • Waruberon • Watesari • Wonokarang • Wonokupang
35.15.15	Buduran		15	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Banjarkemantran • Banjarsari • Buduran • Damarsi • Dukuhtengah • Entalsewu • Pagerwojo

				<ul style="list-style-type: none"> • Prasung • Sawohan • Sidokerto • Sidomulyo • Sidokepong • Siwalanpanji • Sukorejo • Wadungasin
35.15.07	Candi	24	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Balongdowo • Balonggabus • Bligo • Candi • Durungbanjar • Durungbedug • Gelam • Jambangan • Kalipecabean • Karangtanjung • Kebonsari • Kedungkendo • Kedungpeluk • Kendalpecabean • Klurak • Larangan • Ngampelsari • Sepande • Sidodadi • Sugihwaras • Sumokali • Sumorame • Tenggulunan • Wedoroklurak
35.15.16	Gedangan	15	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bangah • Ganting • Gedangan • Gemurung • Karangbong • Keboan Sikep • Keboan Anom • Ketajen • Kragan

				<ul style="list-style-type: none"> • Punggul • Sawo Tratap • Semambung • Seruni • Tebel • Wedi 	
35.15.05	Jabon	15	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Balongtani • Besuki • Dukuhsari • Jemirahan • Keboguyang • Kedungcangkring • Kedungpandan • Kedungrejo • Kupang • Pangreh • Pejarakan • Permisan • Semambung • Tambakkalisogo • Trompoasri 	
35.15.03	Krembung	19	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Balanggarut • Cankring • Gading • Jenggot • Kandangan • Kedungrawan • Kedungsumur • Keper • Keret • Krembung • Lemujut • Mojoruntut • Ploso • Rejeni • Tambakrejo • Tanjégwagir • Wangkal • Wonomlati • Waung 	
35.15.11	Krian	3	19	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Barengkrajan

			<ul style="list-style-type: none"> • Gamping • Jaticalang • Jerukgamping • Junwangi • Katerungan • Keboharan • Kraton • Ponokawan • Sedenganmijen • Sidomojo • Sidomulyo • Sidorejo • Tempel • Terik • Terungkulon • Terungwetan • Tropodo • Watugolong
			<ul style="list-style-type: none"> • Kemasan • Krian • Tambak Kemerakan
35.15.02	Prambon	20	Kelurahan Desa <ul style="list-style-type: none"> • Bendotretak • Bulang • Cangkringturi • Gampang • Gedangrowo • Jatialunalun • Jaticalang • Jedongcangkring • Kajartrengguli • Kedungkembar • Kedungsugo • Kedungwonokerto • Pejangkungan • Prambon • Simogirang • Simpang • Temu • Watutulis • Wirobiting • Wonoplintahan

35.15.04	Porong	6	13	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Candipari • Glagaharum • Kebakalan • Kebonagung • Kedungboto • Kedungsolo • Kesambi • Lajuk • Pamotan • Pesawahan • Plumbon • Reno Kenongo • Wunut
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Gedang • Jatirejo • Juwetkenongo • Mindi • Porong • Siring
35.15.17	Sedati		16	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Banjarkemuningtambak • Betro • Buncitan • Cemandi • Gisikcemandi • Kalanganyar • Kwangsan • Pabean • Pepe • Pranti • Pulungan • Sedatiagung • Sedatigede • Segorotambak • Semampir • Tambakcemandi
35.15.08	Sidoarjo	14	10	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Banjarbendo • Bluru Kidul • Cemengbakalan • Jati • Kemiri • Lebo

					<ul style="list-style-type: none"> • Rangkah Kidul • Sarirogo • Suko • Sumput
				Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Bulusidokare • Celep • Cemengkalang • Gebang • Lemahputro • Magersari • Pekauman • Pucang • Pucanganom • Sekardangan • Sidokare • Sidoklumpuk • Sidokumpul • Urangagung
35.15.14	Sukodono	19	Desa		<ul style="list-style-type: none"> • Anggaswangi • Bangsri • Cangkringsari • Jumputrejo • Kebonagung • Keloposepuluh • Jogosatru • Masangankulon • Masanganwetan • Ngaresrejo • Pademonegoro • Panjunan • Pekarungan • Plumbungan • Sambungrejo • Sukodono • Suko • Suruh • Wilayut
35.15.13	Taman	8	16	Desa	<ul style="list-style-type: none"> 4. Bohar 5. Bringinbendo 6. Gilang 7. Jemundo

				<ul style="list-style-type: none"> 8. Kedungturi 9. Kragan 10. Kletek 11. Kramatjegu 12. Krembangan 13. Pertapan Maduretno 14. Sadang 15. Sambibulu 16. Sidodadi 17. Tawang Sari 18. Trosobo 19. Wage
			Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Bebekan • Geluran • Kalijaten • Ketegan • Ngelom • Sepanjang • Taman • Wonocolo
35.15.06	Tanggulangun	19	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kalitengah • Kludan • Boro • Ngaban • Putat • Kedungbanteng • Banjarpanji • Banjarsari • Penatarsewu • Sentul • Kalidawir • Gempolsari • Kedungbendo • Ketapang • Kalisampurno • Kedensari • Ketegan • Ganggang Panjang • Randegan
35.15.01	Tarik	20	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Banjarwungu

			<ul style="list-style-type: none"> • Balongmacekan • Gampingrowo • Gedangklutuk • Janti • Kalimati • Kedungbocok • Kedinding • Kemuning • Kendalsewu • Klantingsari • Kramattemanggung • Mergobener • Mergosari • Mindugading • Miriprowo • Sebani • Segodobancang • Singgogalih • Tarik 	
35.15.09	Tulangan	22	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Gelang • Grabangan • Grinting • Grogol • Janti • Jiken • Kajeksan • Kebaran • Kedondong • Kemantren • Kenongo • Kepatihan • Kepadangan • Kepuhkemiri • Kepunten • Medalem • Modong • Pangkemiri • Singopadu • Sudimoro • Tlasih • Tulangan

35.15.18	Waru	17	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berbek • Bungurasih • Janti • Kedungrejo • Kepuhkiriman • Kureksari • Medaeng • Ngingas • Pepelegi • Tambakoso • Tambarejo • Tambaksawah • Tambaksumur • Tropodo • Wadungasri • Waru • Wedoro
35.15.10	Wonoayu	23	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Becirongengor • Candinegoro • Jimbarankulon • Jimbaranwetan • Karangpuri • Ketimang • Lambangan • Mojorangagung • Mulyodadi • Pagerngumbuk • Pilang • Plaosan • Ploso • Popoh • Sawocangkring • Semambung • Simoanginangin • Simoketawang • Sumberejo • Tanggul • Wonoayu • Wonokalang • Wonokasih
•	TOTAL	31	322	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

4.2 Analisis Data dan Hasil

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang sudah terkumpul dari kuisisioner yang telah tersebar terhadap responden ataupun karyawan dengan cara mendeskripsifikannya atau menggambarkan data yang ada. Sebagaimana tersedia pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Tingkat Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner yang disebar	300
Kuisisioner yang kembali	300
Persentase respon rate	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	0
Kuisisioner yang dianalisis	300

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 300 kuisisioner yang telah disebar kepada responden yang ada di pemerintahan desa kabupaten Sidoarjo, terdapat 300 kuisisioner yang kembali dan tidak ada responden yang tidak mengembalikan kuisisioner. Jadi, persentase respon rate ini akan menjadi bahan penelitian dari jawaban semua responden yang berjumlah 300 orang responden. Demikian merupakan deskripsi responden yang dijadikan sampel penelitian untuk mendapatkan data.

1) Penilaian Responden Terhadap Identitas Responden

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan sekaligus memberikan kuisioner yang berisi butir pertanyaan pada Pemerintahan Desa Kabupaten Sidoarjo. Dengan memakai sejumlah pertanyaan sebanyak 23 butir pertanyaan. Yang dirincikan pertanyaannya dari variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1) sejumlah 8 pertanyaan, untuk variable Dana Desa (X2) sejumlah 7 pertanyaan, untuk variable Bantuan Keuangan APBD (X3) sejumlah 4 pertanyaan, Dan Belanja Desa (Y) sejumlah 4 pertanyaan. Dibawah ini adalah data responden dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	146	48.7
Wanita	154	51.3
Total	300	100.0%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin Wanita Sebanyak 154 Orang Atau sebesar 51.3%, sedangkan untuk yang berjenis kelamin pria sebanyak 146 Orang atau sebesar 48.7%.

b. Identifikasi Responden Berdasarkan Usia Responden

Tabel 4.4

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia Responden	Jumlah	Persentase
26-35 tahun	131	43.7
36-45 tahun	113	37.7
> 46 tahun	56	18.7
Total	300	100.0%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki usia 26-35 tahun sebanyak 131 Orang atau sebesar 43.7%, untuk yang berusia 36-45 tahun Sebanyak 113 Orang Atau sebesar 37.7%, dan untuk yang berusia > 46 tahun sebanyak 56 orang atau sebesar 18.7%.

c. Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.5

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	159	53.0
Diploma	31	10.3
S1	98	32.7
S2	12	4.0
Total	300	100.0%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini terakhir pendidikannya SMA sebanyak 159 Orang atau

sebesar 53%, untuk yang berpendidikan Diploma Sebanyak 31 Orang Atau sebesar 10,3%, untuk yang berpendidikan terakhirnya S1 sebanyak 98 orang atau sebesar 32,7%, dan untuk yang berpendidikan terakhirnya S2 sebanyak 12 orang atau sebesar 4,0%.

d. Identifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.6

Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Berlangganan	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	70	23.3
2-5 tahun	206	68.7
6-10 tahun	24	8.0
Total	300	100.0%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan table 4.6 diatas dapat diidentifikasi bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yang telah bekerja selama 2-5 tahun sejumlah 206 Responden atau sebesar 68,7%, yang telah bekerja < 1 tahun sejumlah 70 responden atau sebesar 23,3%. yang telah bekerja 6-10 tahun sejumlah 24 responden atau sebesar 8,0%

2) Penilaian Responden Terhadap Butir Pertanyaan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1)

Variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1) mempunyai beberapa butir pernyataan yang terdiri dari 8 pernyataan. Dan adapun penilaian responden terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Penilaian Responden Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1)

No	Indikator	1		2		3		4		5		TOTAL
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X1.1	-	-	4	1.3	25	8.3	137	45.7	134	44.7	300
2	X1.2	-	-	1	0.3	26	8.7	132	44.0	141	47.0	300
3	X1.3	-	-	1	0.3	27	9.0	119	39.7	153	51.0	300
4	X1.4	-	-	1	0.3	25	8.3	116	38.7	158	52.7	300
5	X1.5	-	-	-	-	10	3.3	130	43.3	160	53.3	300
6	X1.6	-	-	-	-	5	1.7	140	46.7	155	51.7	300
7	X1.7	-	-	-	-	11	3.7	130	43.3	159	53.0	300
8	X1.8	-	-	-	-	4	1.3	122	40.7	174	58.0	300

100%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1) terkait dengan adanya pernyataan pertama, nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 4, sebanyak 137 responden dengan memiliki persentase sebesar 45.7%. Pernyataan kedua yaitu dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 141 responden dengan persentase sebesar 47.0%, pernyataan ketiga yaitu dengan nilai yang diperoleh dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 153 responden dengan persentase sebesar 51.0%. Pernyataan ke empat yaitu Dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 158 responden dengan persentase sebesar 52.7%, pernyataan kelima yaitu dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 160 responden dengan persentase sebesar 53.3% . pernyataan keenam yaitu dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 155 responden dengan

persentase sebesar 51.7%. pernyataan Ketujuh yaitu dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 159 responden dengan persentase sebesar 53.0%. pernyataan kedelapan yaitu dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 174 responden dengan persentase sebesar 58.0%. Sehingga persepsi responden dapat dikatakan tinggi maka dengan itu analisis deskriptifnya dapat dinyatakan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1).

2. Dana Desa (X2)

Variable Dana Desa (X2) mempunyai beberapa butir pernyataan yang terdiri dari 7 pernyataan. Dan adapun penilaian responden terhadap Dana Desa (X2) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8

Penilaian Responden Terhadap Dana Desa (X2)

No	Indikator	1		2		3		4		5		TOTAL
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X2.1	-	-	-	-	13	4.3	128	42.7	159	53.0	300
2	X2.2	-	-	-	-	7	2.3	129	43.0	164	54.7	300
3	X2.3	-	-	-	-	12	4.0	114	38.0	174	58.0	300
4	X2.4	-	-	-	-	2	0.7	120	40.0	178	59.3	300
5	X2.5	-	-	-	-	3	1.0	102	34.0	195	65.0	300
6	X2.6	-	-	-	-	1	0.3	119	39.7	180	60.0	300
7	X2.7	-	-	1	0.3	25	8.3	125	41.7	149	49.7	300

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa variable Dana Desa (X2) terkait dengan adanya pernyataan pertama nilai terbesar dari tanggapan

responden yaitu 5, sebanyak 159 responden dengan memiliki persentase sebesar 53,0%. Pernyataan kedua dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 164 responden dengan persentase sebesar 54.7%, pernyataan ketiga dengan nilai yang diperoleh dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 174 responden dengan persentase sebesar 58.0%. Pernyataan keempat Dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 178 responden dengan persentase sebesar 59.3%, Pernyataan kelima Dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 195 responden dengan persentase sebesar 65.0%, Pernyataan keenam dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 180 responden dengan persentase sebesar 60.0%. Pernyataan Ketujuh dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 149 responden dengan persentase sebesar 49.7%. Sehingga persepsi responden dapat dikatakan tinggi, maka dengan itu analisis deskriptifnya dapat dinyatakan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap variable Dana Desa (X2).

3. Bantuan Keuangan APBD (X3)

Variable Bantuan Keuangan APBD (X3) mempunyai beberapa butir Pernyataan yang terdiri dari 4 Pernyataan. Dan adapun penilaian responden terhadap Bantuan Keuangan APBD (X3) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Penilaian Responden Terhadap Bantuan Keuangan APBD (X3)

No	Indikator	1		2		3		4		5		TOTAL
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X3.1	-	-	1	0.3	22	7.3	113	37.7	164	54.7	300
2	X3.2	-	-	-	-	26	8.7	127	42.3	147	49.0	300
3	X3.3	-	-	-	-	15	5.0	130	43.3	155	51.7	300
4	X3.4	-	-	-	-	6	2.0	118	39.3	176	58.7	300

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa variable Bantuan Keuangan APBD (X3) terkait dengan adanya pernyataan pertama nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 164 responden dengan memiliki persentase sebesar 54.7%. Pernyataan kedua dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 147 responden dengan persentase sebesar 49.0%, pernyataan ketiga dengan nilai yang diperoleh dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 155 responden dengan persentase sebesar 51.7%. Pernyataan ke empat Dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 176 responden dengan persentase sebesar 58.7%, Sehingga persepsi responden dapat dikatakan tinggi maka dengan itu analisis deskriptifnya dapat dinyatakan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap variable Bantuan Keuangan APBD (X3).

4. Belanja Desa (Y)

Variable Belanja Desa (Y) mempunyai beberapa butir Pernyataan yang terdiri dari 4 Pernyataan. Dan adapun penilaian responden terhadap Belanja Desa (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10

Penilaian Responden Terhadap Belanja Desa (Y)

No	Indikator	1		2		3		4		5		TOTAL
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Y1.1	-	-	-	-	12	4.0	121	40.3	167	55.7	300
2	Y1.2	-	-	1	0.3	6	2.0	111	37.0	182	60.7	300
3	Y1.3	-	-	-	-	10	3.3	124	41.3	166	55.3	300
4	Y1.4	-	-	-	-	12	4.0	116	38.7	172	57.3	300

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa variable Belanja Desa (Y) terkait dengan adanya pernyataan pertama nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 167 responden dengan memiliki persentase sebesar 55.7%. Pernyataan kedua dengan nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 182 responden dengan persentase sebesar 60.7%, pernyataan ketiga dengan nilai yang diperoleh dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 166 responden dengan persentase sebesar 55.3%. pernyataan keempat dengan nilai yang diperoleh dari tanggapan responden yaitu 5, sebanyak 172 responden dengan persentase sebesar 57.3%. Sehingga persepsi responden dapat dikatakan tinggi maka dengan itu analisis deskriptifnya dapat dinyatakan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap variable Belanja Desa (Y).

4.2.2 Pengujian Kualitas Data

Agar peneliti dapat mengetahui hasil penelitian, maka diperlukan instrument yang valid dan *reliable*. Instrument yang valid berarti alat ukur yang harus digunakan untuk mendapatkan data dalam (pengukuran) harus valid, sedangkan instrument *reliable* adalah instrument yang jika digunakan beberapa

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan terjadi hasil data yang sama.

Secara rinci pengujian instrument penelitian ini disajikan, sebagai berikut :

a. Uji Validitas

Kuisisioner dikatakan valid jika pernyataan yang ada pada kuisisioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Menurut sugiyono (2016) menyatakan dalam menghitung validitas menggunakan *Correlation Person Moment*. Analisis factor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor factor dengan skor total, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) kurang dari 0,3 maka dikatakan tidak valid.
- 2) Jika nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) sama dengan atau lebih dari 0,3 maka dikatakan valid.

Tabel 4.11

Uji Validitas

Variabel	Item Variabel	Correlation (r-hitung)	r-kritis	Keterangan
Belanja Desa (Y)	Y1.1	.620	0.30	Valid
	Y1.2	.681	0.30	Valid
	Y1.3	.374	0.30	Valid
	Y1.4	.330	0.30	Valid
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	X1.1	.313	0.30	Valid
	X1.2	.445	0.30	Valid
	X1.3	.329	0.30	Valid

(X1)	X1.4	.454	0.30	Valid
	X1.5	.446	0.30	Valid
	X1.6	.381	0.30	Valid
	X1.7	.514	0.30	Valid
	X1.8	.545	0.30	Valid
Dana Desa (X2)	X2.1	.377	0.30	Valid
	X2.2	.383	0.30	Valid
	X2.3	.353	0.30	Valid
	X2.4	.721	0.30	Valid
	X2.5	.301	0.30	Valid
	X2.6	.700	0.30	Valid
	X2.7	.663	0.30	Valid
Bantuan Keuangan APBD (X3)	X3.1	.515	0.30	Valid
	X3.2	.570	0.30	Valid
	X3.3	.771	0.30	Valid
	X3.4	.526	0.30	Valid

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Pada hasil pengujian validitas diatas menyatakan bahwa seluruh item pernyataan kuisisioner variable (X) dan variable (Y) memiliki nilai koefesien korelasi diatas 0,30 ($>0,30$), sehingga dari variable (X) dan variable (Y) keseluruhan dapat dinyatakan **valid**.

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuisisioner dapat dikatakan reliable jika responden menjawab pernyataan dengan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menggunakan teknik alpha cronbach, dikatakan bahwa instrument memiliki nilai reliable yang tinggi jika nilai alpha cronbach $>$

0,7 (Sugiyono, 2017). Dari hasil analisis diperoleh koefisien reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.12

Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai alpha cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X1)	0.740	0.7	Reliabel
Dana Desa (DD) (X2)	0.712	0.7	Reliabel
Bantuan Keuangan APBD (X3)	0.740	0.7	Reliabel
Belanja Desa (Y)	0.726	0.7	Reliabel

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Dari data table diatas, dapat dilihat terdapat nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha pada variable Belanja Desa (Y) sebesar 0.726, variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X1) sebesar 0.740, sedangkan variable Dana Desa (DD) (X2) memiliki nilai 0.712, Bantuan Keuangan APBD (X3) memiliki nilai 0.740. Dari hasil penelitian tersebut maka dari pernyataan instrument variable Alokasi Dana Desa (ADD) (X1), variable Dana Desa (DD) (X2), Bantuan Keuangan APBD (X3) dan Belanja Desa (Y) ini bahwa instrument kuisisioner yang digunakan dikatakan memiliki reliabilitas.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui besarnya factor variable yang digunakan dalam penelitian ini, variable tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD) (X1), variable Dana Desa (DD) (X2), Bantuan Keuangan APBD (X3) dalam mempengaruhi variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y) pada Pemerintahan Desa Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linier yang menggunakan bantuan program *software* SPSS versi 27 for windows:

Tabel 4.13

Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.785	1.715		4.538	.000
	Alokasi Dana Desa	4.027	.033	.047	3.832	.006
	Dana Desa	5.140	.041	.194	3.428	.001
	Bantuan Keuangan APBD	3.276	.053	.285	5.188	.000

Sumber: Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Berdasarkan hasil table diatas dapat dilihat dan dijelaskan bahwa persamaan yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 7.785 + 4.027X_1 + 5.140X_2 + 3.276X_3$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam persamaan diatas dapat dijelaskan makna dari koefisien regresi sebagai berikut :

1) Konstanta (a)

Nilai konstanta adalah 7.785. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variable bebas yaitu Alokasi Dana Desa (X1), Dana Desa (X2), Dan Bantuan Keuangan APBD (X3), maka nilai dalam variable terikatnya yaitu variable Belanja Desa (Y) tetap konstan sebesar 7.785.

2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X1)

Koefisien bernilai positif 4.027 antara variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X1) dengan variable Belanja Desa (Y). hal ini dapat diartikan bahwa variable tersebut memiliki hubungan yang positif. Maka dapat disimpulkan bahwa jika variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X1) mengalami kenaikan satu satuan, maka variable Belanja Desa (Y) juga akan mengalami kenaikan sebesar 4.027 satuan.

3) Dana Desa (DD) (X2)

Koefisien bernilai positif 5.140 antara variable Dana Desa (DD) (X2) dengan variable Belanja Desa (Y). hal ini dapat diartikan bahwa variable tersebut memiliki hubungan yang positif. Maka dapat disimpulkan bahwa jika variable Dana Desa (DD) (X2) mengalami kenaikan satu satuan, maka variable Belanja Desa (Y) juga akan mengalami kenaikan sebesar 5.140 satuan.

4) Bantuan Keuangan APBD (X3)

Koefisien bernilai positif 3.276 antara variable Bantuan Keuangan APBD (X3) dengan variable Belanja Desa (Y). hal ini dapat diartikan bahwa variable tersebut memiliki hubungan yang positif. Maka dapat disimpulkan bahwa jika variable Bantuan Keuangan APBD (X3) mengalami kenaikan satu satuan,

maka variable Belanja Desa (Y) juga akan mengalami kenaikan sebesar 3.276 satuan.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji (R^2) digunakan untuk menghitung tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun analisis determinasi berganda adalah alat analisis untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas secara simultan (serempak) terhadap naik turunnya variabel terikat. Hasil penghitungan SPSS mengenai analisisnya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel 4.14
Hasil Uji R Square

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.875^a	.840	.832	1.273	1.721
a. Predictors: (Constant), Bantuan Keuangan APBD , Alokasi Dana Desa , Dana Desa					
b. Dependent Variable: Belanja Desa					

Sumber: Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Pada table diatas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R adalah 0,875 atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan (korelasi) yang kuat antara variabel bebas yang meliputi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X_1), Dana Desa (DD) (X_2), dan Bantuan Keuangan APBD (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Belanja Desa (Y).

Adapun analisis determinasi berganda, dari tabel diatas diketahui presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukan oleh nilai R square adalah 0,840 maka koefisien determinasi berganda $0,840 \times 100\% = 84,0\%$ dan sisanya $100\% - 84,0\% = 16\%$. Hal ini berarti naik turunnya variabel terikat yaitu Belanja Desa (Y) dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X_1), Dana Desa (DD) (X_2), dan Bantuan Keuangan APBD (X_3) sebesar 84,0%. Sedangkan sisanya sebesar 16,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji t (Uji parsial)

Pada uji hipotesis ini menggunakan uji t dipergunakan untuk mengukur tingkat pengaruh signifikansi secara parsial antara variabel independen yang meliputi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X_1), Dana Desa (DD) (X_2), dan Bantuan Keuangan APBD (X_3) terhadap Belanja Desa (Y) pada Pemerintahan Desa Kabupaten Sidoarjo. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan SPSS versi 27 mengenai analisis uji t (uji parsial) ditunjukkan oleh table dibawah ini :

Tabel 4.15
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.785	1.715		4.538	.000
	Alokasi Dana Desa	4.027	.033	.047	3.832	.006
	Dana Desa	5.140	.041	.194	3.428	.001
	Bantuan Keuangan APBD	3.276	.053	.285	5.188	.000

Sumber: Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

- Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat signifikan $0,006 < 0,05$, sehingga **H1** yang menyatakan bahwa variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1) secara parsial mempunyai pengaruh Terhadap Belanja Desa (Y) **diterima**.
- Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat signifikan $0,001 < 0,05$,

sehingga **H2** yang menyatakan bahwa variabel Dana Desa (X2) secara parsial mempunyai pengaruh Terhadap Belanja Desa (Y) **diterima**.

3. Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga **H3** yang menyatakan bahwa variabel Bantuan Keuangan APBD (X3) secara parsial mempunyai pengaruh Terhadap Belanja Desa (Y) **diterima**.

Table 4.16
Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Uraian	Hasil	Keterangan
1	H1 : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa	Diterima	$0,006 < 0,05$
2	H2 : Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa	Diterima	$0,001 < 0,05$
3	H3 : Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa	Diterima	$0,000 < 0,05$

Sumber: Hasil Di olah peneliti (2023)

4.3 Pembahasan

1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa

Hasil pengujian Regresi Linear Berganda variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,006 dibawah tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap

Belanja Desa diterima dan mempengaruhi Pemerintah Desa Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Belanja Desa. Hasil pengujian yang dilakukan dapat mendukung hipotesis yang diajukan.

Secara teoritis alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang kemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah sebesar 10%. Aparatur desa lebih memosisikan penggunaan alokasi dana desa sebagai belanja desa yang ditujukan untuk sumber daya masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Kebijakan pemerintah dalam memberikan dana transfer berupa alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Penggunaan alokasi dana desa sebesar 70% digunakan untuk belanja desa dibidang masyarakat seperti penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, pengembangan sosial budaya, perbaikan sarana kesehatan, keagamaan dan pendidikan, biaya untuk mengadakan ketahanan pangan, rumah tidak layak huni. Sedangkan penggunaan alokasi dana desa sebesar

30% digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti belanja aparatur pemerintahan desa dan belanja operasional pemerintah desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh ((Hasan & Tanesab, 2021); (Indika et al., 2022) ; (Taen & Eriswanto, 2022); (Amnan et al., 2019); (Muslikah et al., 2020); (Murti, 2018); (Mumpuni, 2021); (Janah, 2018); (Yuliawati, 2019); (Pramukti, 2020); (Widyawati, 2022); (Dasuki, 2020)) menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh ((Ma'ruf & Bawono, 2019); (Wardhana, 2017)) menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Desa.

2) Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa

Hasil pengujian Regresi Linear Berganda variabel Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dibawah tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa diterima dan mempengaruhi Pemerintah Desa Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Belanja Desa. Hasil pengujian yang dilakukan dapat mendukung hipotesis yang diajukan.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan belanja kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan baru diimplementasikannya

Undang-Undang tentang Desa yang juga terkait dengan pengalokasian Dana Desa, saat ini Dana Desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dana desa merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pemerintah desa sebesar 10%. Dana desa yang diterima oleh setiap desa berbeda-beda sesuai dengan alokasi dasar dan alokasi formula masing-masing. Prioritas penggunaan dana desa untuk belanja desa ditujukan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Artinya kebijakan pemerintah dalam memberikan dana transfer berupa dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Semakin besar Dana Desa yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai kewenangan desa semakin tinggi. Desa-Desa Se-Kabupaten Sidoarjo masih bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat dalam mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ((Hasan & Tanesab, 2021); (Ma'ruf & Bawono, 2019); (Indika et al., 2022) ; (Taen & Eriswanto, 2022); (Muslikah et al., 2020); (Mumpuni, 2021); (Janah, 2018); (Yuliawati, 2019); (Widyawati, 2022)) menyatakan bahwa Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh ((Wardhana, 2017); (Murti, 2018)) menyatakan bahwa Dana Desa tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Desa.

3) Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa

Hasil pengujian Regresi Linear Berganda variabel Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa diterima dan mempengaruhi Pemerintah Desa Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Belanja Desa. Hasil pengujian yang dilakukan dapat mendukung hipotesis yang diajukan.

Bantuan Keuangan APBD merupakan dana yang dihasilkan dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah desa sesuai dengan prosentasi dari hasil kekayaan alam yang dikelola dan pajak yang diterima oleh pemerintah desa, akan tetapi di Kabupaten Sidoarjo, pembagian Bantuan Keuangan APBD menggunakan metode bagi rata sehingga tidak ada variasi pengaruh besaran bagi hasil pajak dan retribusi ini terhadap belanja bidang pembangunan desa.

Menurut Rusydi (2012), adanya bantuan keuangan Desa memiliki hubungan yang sangat erat terhadap Belanja Desa. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa bantuan keuangan Desa yang cukup efektif untuk meningkatkan Belanja Desa. Jika setiap tahunnya pemerintah desa mendapatkan anggaran dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota karena dengan adanya Bantuan ini yang sudah pasti akan meringankan pemerintahan desa dalam hal dana untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada penyelewengan anggaran dan benar-benar diperuntukkan sebagaimana mestinya. Pengawasan adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala selama proses berlangsungnya kegiatan terkait. Sementara evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir suatu kegiatan.

Peranan Bantuan Keuangan APBD terhadap Belanja Desa digunakan untuk meringankan proses pendanaan program kerja pemerintah desa, akan tetapi tiap tahunnya memiliki anggaran yang berbeda di karenakan bantuan keuangan APBD kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan skala desa, pengelolaan

tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa. alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan keadilan.

Menurut Suardi (2019) bahwa Bantuan Keuangan kepada desa di kabupaten sidoarjo berbeda setiap tahun, perhitungan pengalokasian dana desa berpatokan pada peraturan pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014. Ada perubahan peraturan pemerintah dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian dana desa secara lebih menyeluruh saat pelaksanaannya tahun 2015.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh ((Yuliawati, 2019); (Pramukti, 2020)) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah sebesar 10%. Aparatur desa lebih memposisikan penggunaan alokasi dana desa sebagai belanja desa yang ditujukan untuk sumber daya masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Artinya kebijakan pemerintah dalam memberikan dana transfer berupa dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Semakin besar Dana Desa yang diterima suatu desa maka tingkat ketergantungan dalam membiayai kewenangan desa semakin tinggi. Desa-Desa Se-Kabupaten Sidoarjo masih bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat dalam mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
- 3) Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa. Peranan Bantuan Keuangan APBD terhadap Belanja Desa digunakan untuk meringankan proses pendanaan program kerja pemerintah desa, akan tetapi tiap tahunnya memiliki anggaran yang berbeda di karenakan bantuan keuangan APBD kepada

desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti diantaranya :

1. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.
2. Data yang dianalisis menggunakan instrument yang berdasarkan presepsi jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah bila presepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya.
3. Peneliti Hanya meneliti pada pemerintah desa kabupaten Sidoarjo.
4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independent Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Bantuan Keuangan APBD. Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan memengaruhi Belanja Desa.
5. Hanya menguji hubungan Independen terhadap dependen.

5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya:

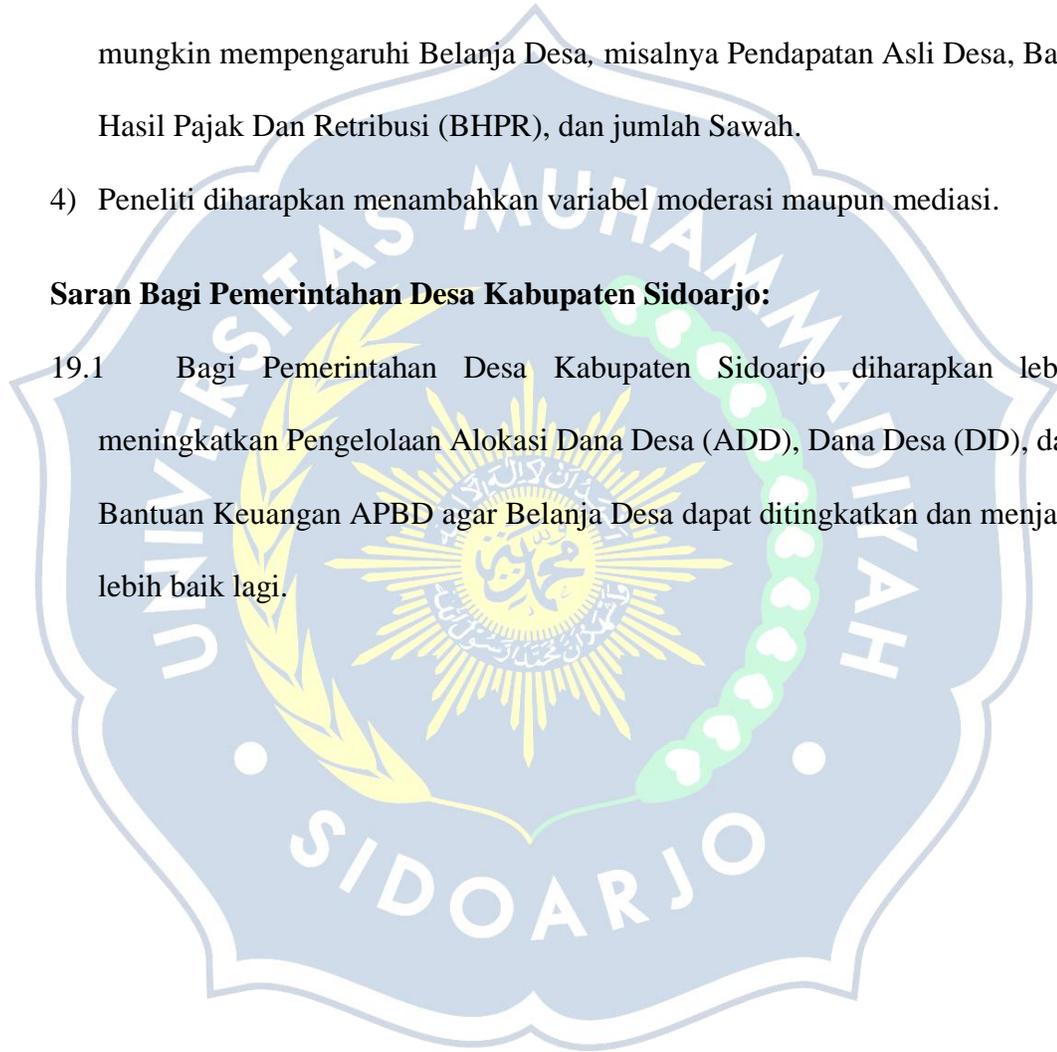
- 1) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti pada Pemerintahan Desa Kabupaten Sidoarjo saja tetapi juga dilakukan pada obyek penelitian yang lain, misalnya pada kabupaten lain sebagai pembanding.
- 2) Perlu dilakukan wawancara kepada seluruh responden yang memungkinkan dapat untuk dipantau secara langsung dan respon juga bisa bertanya langsung

kepada peneliti perihal pertanyaan yang barangkali tidak bisa dipahami yang akhirnya jawaban tiap responden bisa peneliti kendalikan dan kejujuran jawaban mereka bisa terperoleh

- 3) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi Belanja Desa, misalnya Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR), dan jumlah Sawah.
- 4) Peneliti diharapkan menambahkan variabel moderasi maupun mediasi.

Saran Bagi Pemerintahan Desa Kabupaten Sidoarjo:

- 19.1 Bagi Pemerintahan Desa Kabupaten Sidoarjo diharapkan lebih meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bantuan Keuangan APBD agar Belanja Desa dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. (2017). *Statisk Deskriptif*, Yogyakarta, Nuha Medika.
- Amnan, A. R., Sjahrudin, H., & Hardiani. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 1(1), 37–55.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/Jrmb.V4i1.237>
- Dasuki, T. M. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1(2).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, S. M. Al. (2019). *Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23* (Cetakan Vi). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, K., & Tanesab, M. E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Desa , Dana Desa , Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa The Effect Of Village Original Income , Village Funds , And Allocation Of Village Balance Funds On Village Expenditures. *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi*, 2(3), 166–178.
- Indika, M., Marliza, Y., & Marisa, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *Sintama: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
- Janah, A. M. (2018). *Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa (Padesa), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Dana Desa (Dd) Terhadap Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)*. 2017(Dd).
- Langi, M. T. (2022). *Peranan Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Apbd*

Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur.

- Ma'ruf, A. F., & Bawono, A. D. B. (2019). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr) Terhadap Belanja Kesehatan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0, Dd*, 271–284.
- Mumpuni, A. A. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sragen Tahun 2019). Dd.*
- Murti, R. S. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Bagi Hasil Pajak Retribusi (Bhpr) Danjumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri). 2017(Dd).*
- Muslikah, S., Sulisty, & Mustikowati, R. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pad), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Sulisty. *Jrma*, 8(1), 1–10.
- Mustakini, J. H. (2014). *Metode Penelitian Bisnis. Edisi Ke-6. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.*
- Pramukti, E. (2020). *Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa Pendapatan Asli Desa, Dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018).*
- Riyani, N. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016).* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sekaran, U., & Bogie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.*
- Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaalitatif, Dan R&D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2016b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods).* Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Cv Alfabeta.*
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa.* Pustaka Baru Press.

- Syofian, S. (2014). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17 Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Pt Bumi Aksara.*
- Taen, R. S., & Eriswanto, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Desa-Desa Di Kecamatan Palabuhanratu). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3).
- Taslim, A. A. (2021). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.*
- Tenriwaru, T., & Nurwanah, A. (2022). Bimtek Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Resona: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 116. <https://doi.org/10.35906/Resona.V5i2.633>
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*. 1–16.
- Wardhana, B. W. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)*. 2016(Dd).
- Widyawati, A. I. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Rejoso Tahun 2020 - 2021.*
- Yulawati, N. N. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), Pendapatan Asli Desa (Pades), Dan Bantuan Keuangan Apbd Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. Dd.*
- Zakiah. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kueisoner

IDENTITAS RESPONDEN DAN DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN

Kami mohon Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kotak di bawah ini dengan memberikan tanda checklist (✓)

1. Nama Responden :

2. No Responden (diisi oleh peneliti)

3. Jenis Kelamin Responden

Pria

Wanita

4. Usia Responden

< 25 tahun

36-45 tahun

26-35 tahun

> 46 tahun

5. Pendidikan Terakhir Responden

SD

SMA

Sarjana (S-1)

SMP

Diploma

Magister (S-2)

6. Lama Bekerja Responden

< 1 tahun

6-10 tahun

> 15 tahun

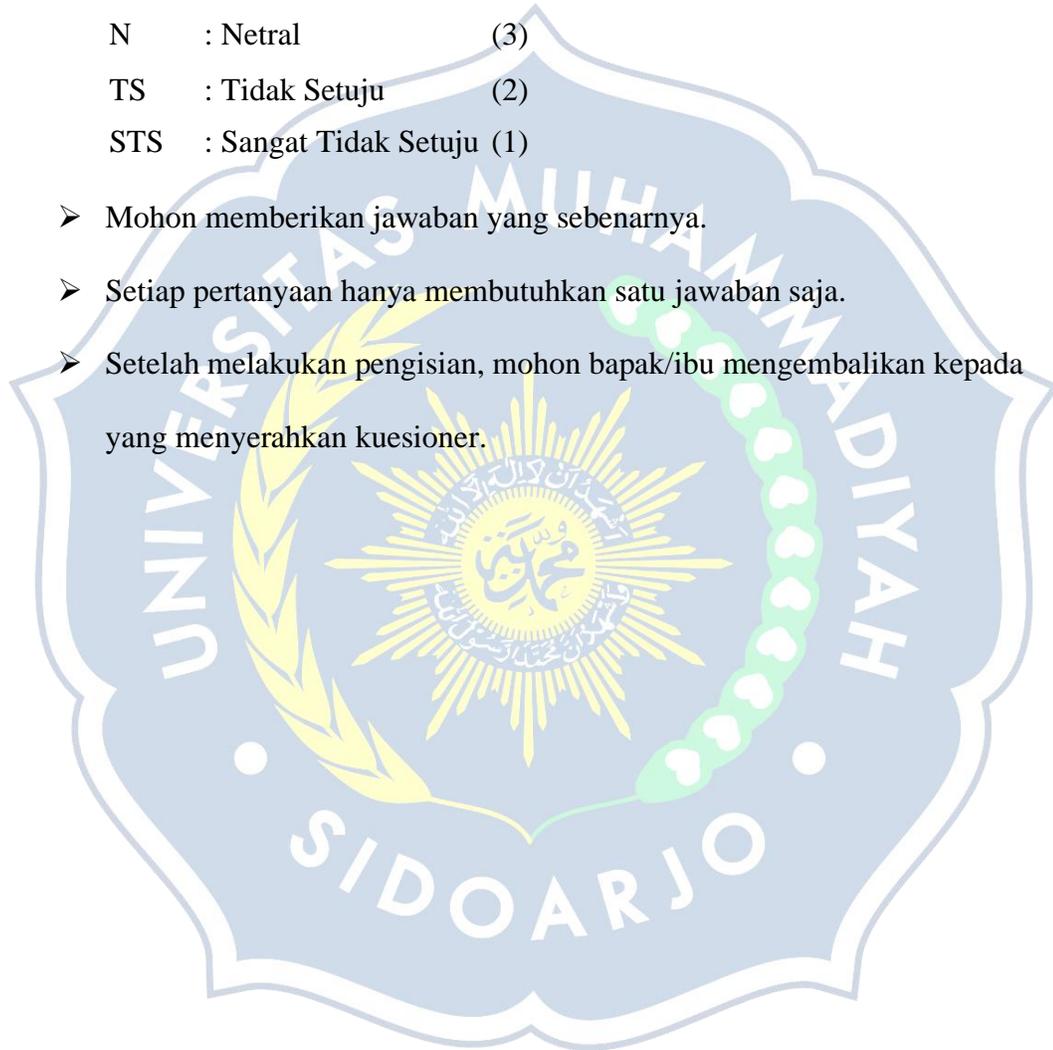
2-5 tahun

11-14 tahun

Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Dengan cara memberikan tanda (☐) pada kolom yang tersedia.

- SS : Sangat Setuju (5)
S : Setuju (4)
N : Netral (3)
TS : Tidak Setuju (2)
STS : Sangat Tidak Setuju (1)

- Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya.
- Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
- Setelah melakukan pengisian, mohon bapak/ibu mengembalikan kepada yang menyerahkan kuesioner.



1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X₁)

No	Butir Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Alokasi Dana Desa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan					
2	Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat					
3	Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan					
4	Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial					
5	Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat					
6	Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat					
7	Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat					
8	Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)					

Sumber : Zakiyah (2015)

2. Dana Desa (X₂)

No	Butir Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Pengelolaan dana desa						
1	Pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran					
Perencanaan						
2	Kegiatan perencanaan dalam penyusunan APDES yang ditetapkan telah sesuai dengan fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya					
Pelaksanaan						
3	Perencanaan dalam pelaksanaan ADD mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014					
Penatausahaan						
4	Penatausahaan dana desa sudah memenuhi standar dalam peraturan undang-undang tentang desa					
Pelaporan						
5	Adanya laporan mengenai rincian penggunaan dana desa kepada masyarakat					
Pertanggungjawaban Dana Desa						
6	Adanya proses dan pertanggung jawaban dalam perencanaan anggaran diawasi secara terus-menerus					

7	Asas-asas transparansi, akuntabel, responsive serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran					
---	---	--	--	--	--	--

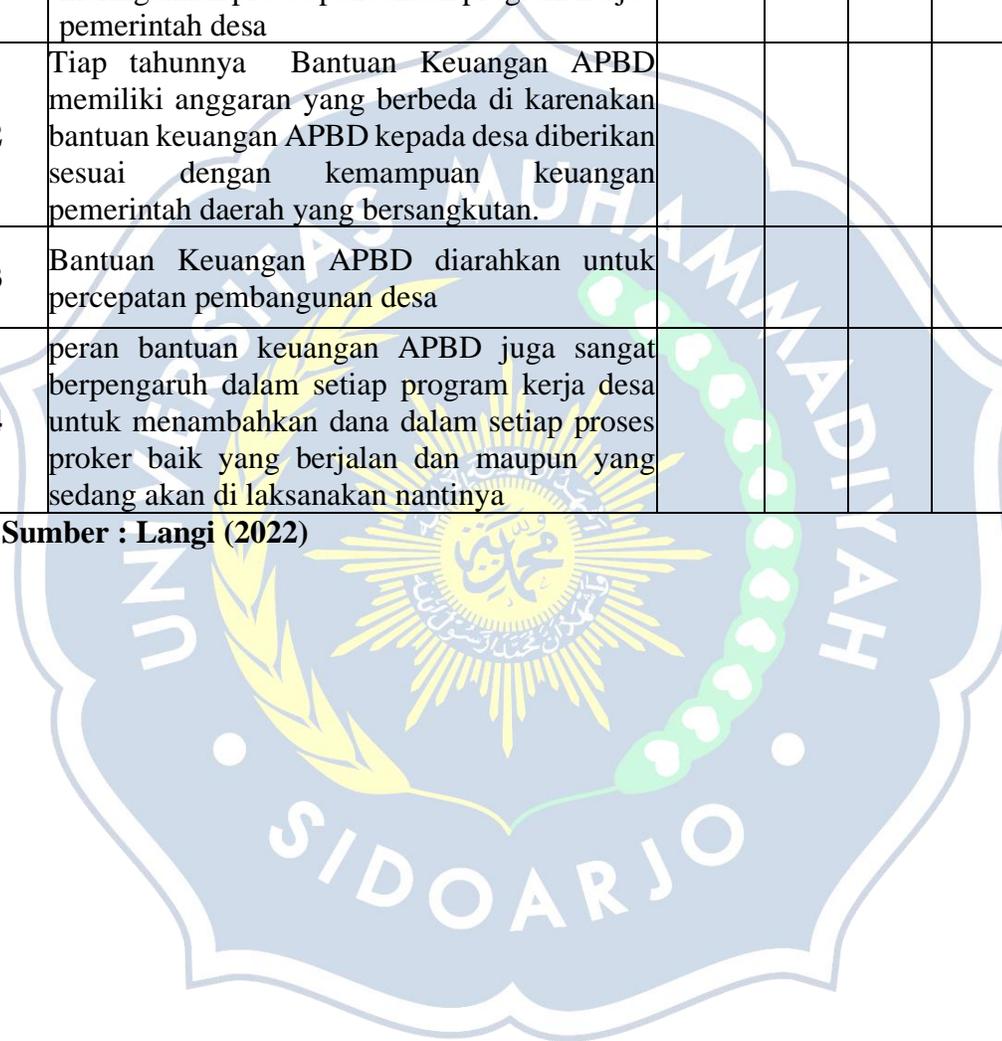
Sumber : Taslim (2021)



3. Bantuan Keuangan APBD (X₃)

No	Butir Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Peranan Bantuan Keuangan APBD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan untuk meringankan proses pendanaan program kerja pemerintah desa					
2	Tiap tahunnya Bantuan Keuangan APBD memiliki anggaran yang berbeda di karenakan bantuan keuangan APBD kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.					
3	Bantuan Keuangan APBD diarahkan untuk percepatan pembangunan desa					
4	peran bantuan keuangan APBD juga sangat berpengaruh dalam setiap program kerja desa untuk menambahkan dana dalam setiap proses proker baik yang berjalan dan maupun yang sedang akan di laksanakan nantinya					

Sumber : Langi (2022)



4. Belanja Desa (Y)

No	Butir Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Belanja Desa merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun						
1	Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.					
Kegunaan belanja desa sesuai dengan realisasi di desa						
2	Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.					
Kegunaan belanja desa sesuai Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014						
3	Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.					
4	Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. b) Operasional pemerintah desa. c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.					

Sumber : Miki Indika, Yayuk Marliza, Aulia Marisa (2022)

Lampiran 2. Tingkat Pengembalian Kuisioner

Keterangan	Jumlah
Kuisioner yang disebarkan	300
Kuisioner yang kembali	300
Persentase respon rate	100%
Kuisioner yang tidak kembali	0
Kuisioner yang dianalisis	300

Sumber : Data Diolah (2023)



Lampiran 3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	146	48.7
Wanita	154	51.3
Total	300	100.0%



Lampiran 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia Responden

Usia Responden	Jumlah	Persentase
26-35 tahun	131	43.7
36-45 tahun	113	37.7
> 46 tahun	56	18.7
Total	300	100.0%

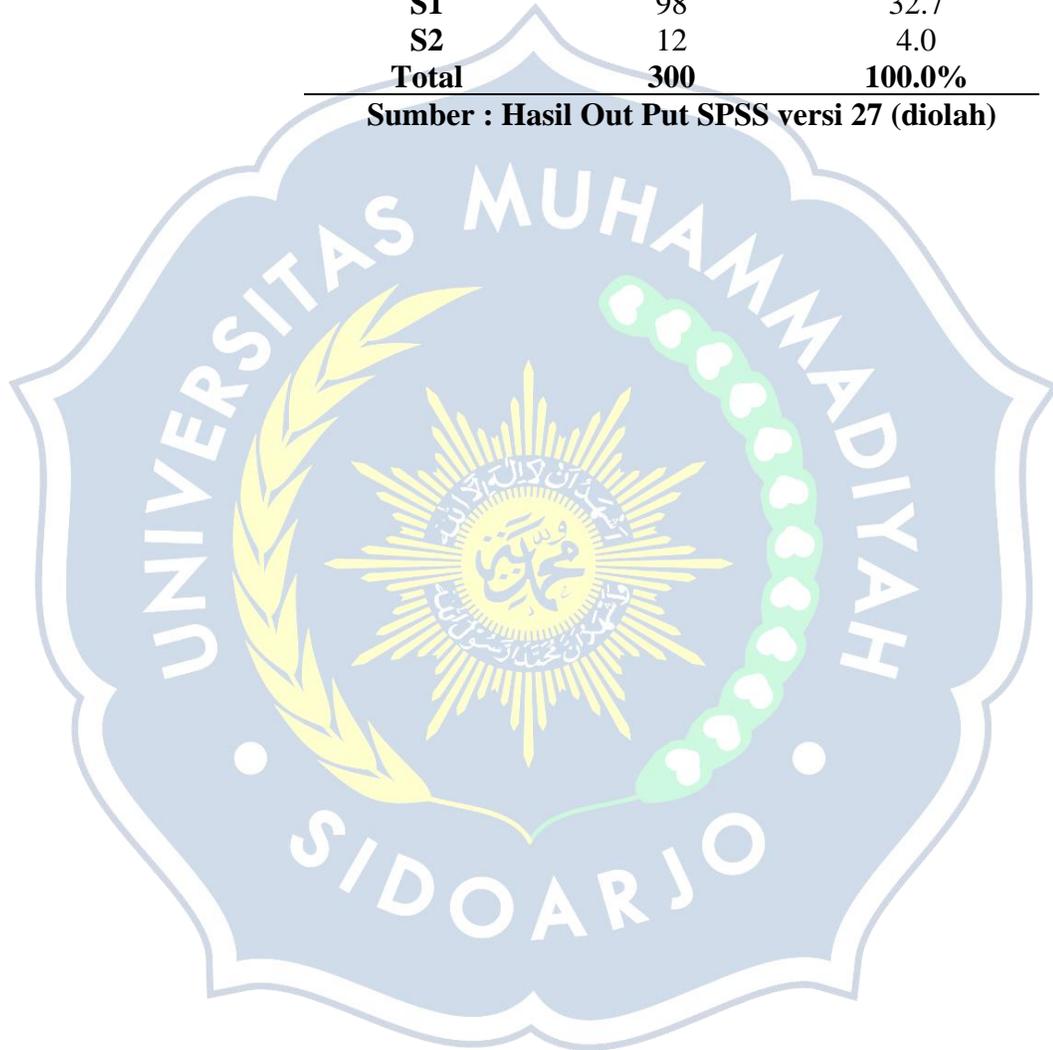
Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)



Lampiran 5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	159	53.0
Diploma	31	10.3
S1	98	32.7
S2	12	4.0
Total	300	100.0%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)



Lampiran 6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Berlangganan	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	70	23.3
2-5 tahun	206	68.7
6-10 tahun	24	8.0
Total	300	100.0%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Lampiran 7. Penilaian Responden Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(X1)

No	Indikator	1		2		3		4		5		TOTAL
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X1.1	-	-	4	1.3	25	8.3	137	45.7	134	44.7	300
2	X1.2	-	-	1	0.3	26	8.7	132	44.0	141	47.0	300
3	X1.3	-	-	1	0.3	27	9.0	119	39.7	153	51.0	300
4	X1.4	-	-	1	0.3	25	8.3	116	38.7	158	52.7	300
5	X1.5	-	-	-	-	10	3.3	130	43.3	160	53.3	300
6	X1.6	-	-	-	-	5	1.7	140	46.7	155	51.7	300
7	X1.7	-	-	-	-	11	3.7	130	43.3	159	53.0	300
8	X1.8	-	-	-	-	4	1.3	122	40.7	174	58.0	300

100%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Lampiran 8. Penilaian Responden Terhadap Dana Desa (X2)

No	Indikator	1		2		3		4		5		TOTAL
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X2.1	-	-	-	-	13	4.3	128	42.7	159	53.0	300
2	X2.2	-	-	-	-	7	2.3	129	43.0	164	54.7	300
3	X2.3	-	-	-	-	12	4.0	114	38.0	174	58.0	300
4	X2.4	-	-	-	-	2	0.7	120	40.0	178	59.3	300
5	X2.5	-	-	-	-	3	1.0	102	34.0	195	65.0	300
6	X2.6	-	-	-	-	1	0.3	119	39.7	180	60.0	300
7	X2.7	-	-	1	0.3	25	8.3	125	41.7	149	49.7	300

100%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

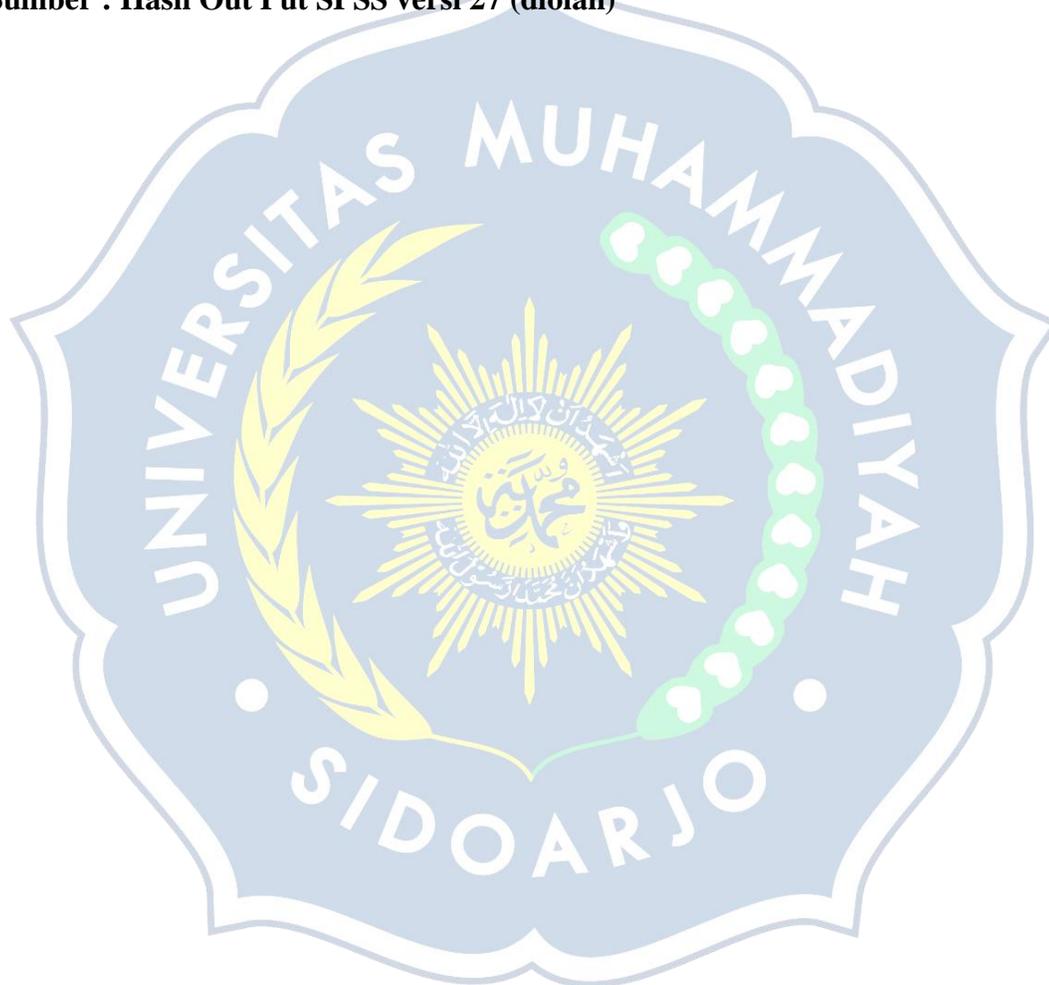


Lampiran 9. Penilaian Responden Terhadap Bantuan Keuangan APBD (X3)

No	Indikator	1		2		3		4		5		TOTAL
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X3.1	-	-	1	0.3	22	7.3	113	37.7	164	54.7	300
2	X3.2	-	-	-	-	26	8.7	127	42.3	147	49.0	300
3	X3.3	-	-	-	-	15	5.0	130	43.3	155	51.7	300
4	X3.4	-	-	-	-	6	2.0	118	39.3	176	58.7	300

100%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)



Lampiran 10. Penilaian Responden Terhadap Belanja Desa (Y)

No	Indikator	1		2		3		4		5		TOTAL
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Y1.1	-	-	-	-	12	4.0	121	40.3	167	55.7	300
2	Y1.2	-	-	1	0.3	6	2.0	111	37.0	182	60.7	300
3	Y1.3	-	-	-	-	10	3.3	124	41.3	166	55.3	300
4	Y1.4	-	-	-	-	12	4.0	116	38.7	172	57.3	300

100%

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)



Lampiran 11. Uji Validitas

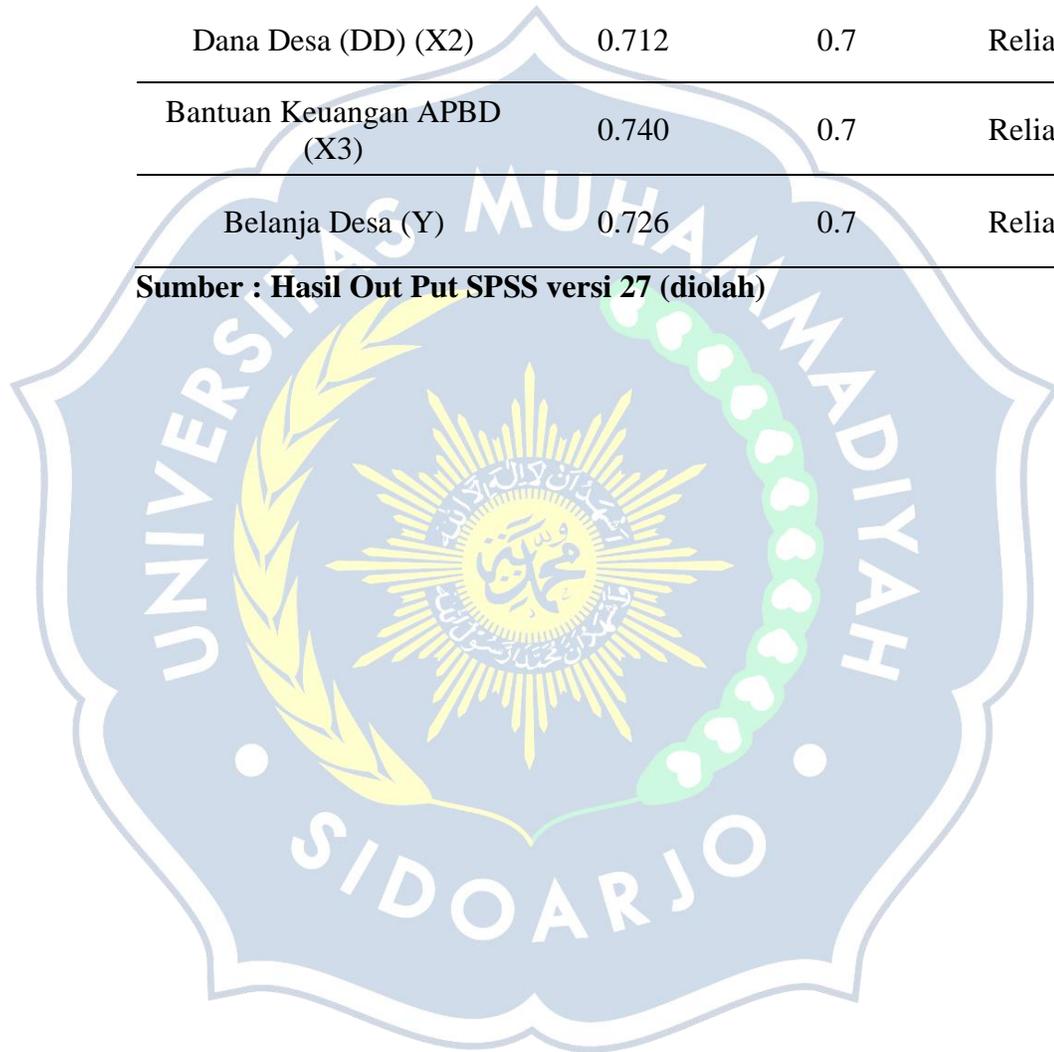
Variabel	Item Variabel	Correlation (r-hitung)	r-kritis	Keterangan
Belanja Desa (Y)	Y1.1	.620	0.30	Valid
	Y1.2	.681	0.30	Valid
	Y1.3	.374	0.30	Valid
	Y1.4	.330	0.30	Valid
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X1)	X1.1	.313	0.30	Valid
	X1.2	.445	0.30	Valid
	X1.3	.329	0.30	Valid
	X1.4	.454	0.30	Valid
	X1.5	.446	0.30	Valid
	X1.6	.381	0.30	Valid
	X1.7	.514	0.30	Valid
	X1.8	.545	0.30	Valid
Dana Desa (X2)	X2.1	.377	0.30	Valid
	X2.2	.383	0.30	Valid
	X2.3	.353	0.30	Valid
	X2.4	.721	0.30	Valid
	X2.5	.301	0.30	Valid
	X2.6	.700	0.30	Valid
	X2.7	.663	0.30	Valid
Bantuan Keuangan APBD (X3)	X3.1	.515	0.30	Valid
	X3.2	.570	0.30	Valid
	X3.3	.771	0.30	Valid
	X3.4	.526	0.30	Valid

Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)

Lampiran 12. Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai alpha cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X1)	0.740	0.7	Reliabel
Dana Desa (DD) (X2)	0.712	0.7	Reliabel
Bantuan Keuangan APBD (X3)	0.740	0.7	Reliabel
Belanja Desa (Y)	0.726	0.7	Reliabel

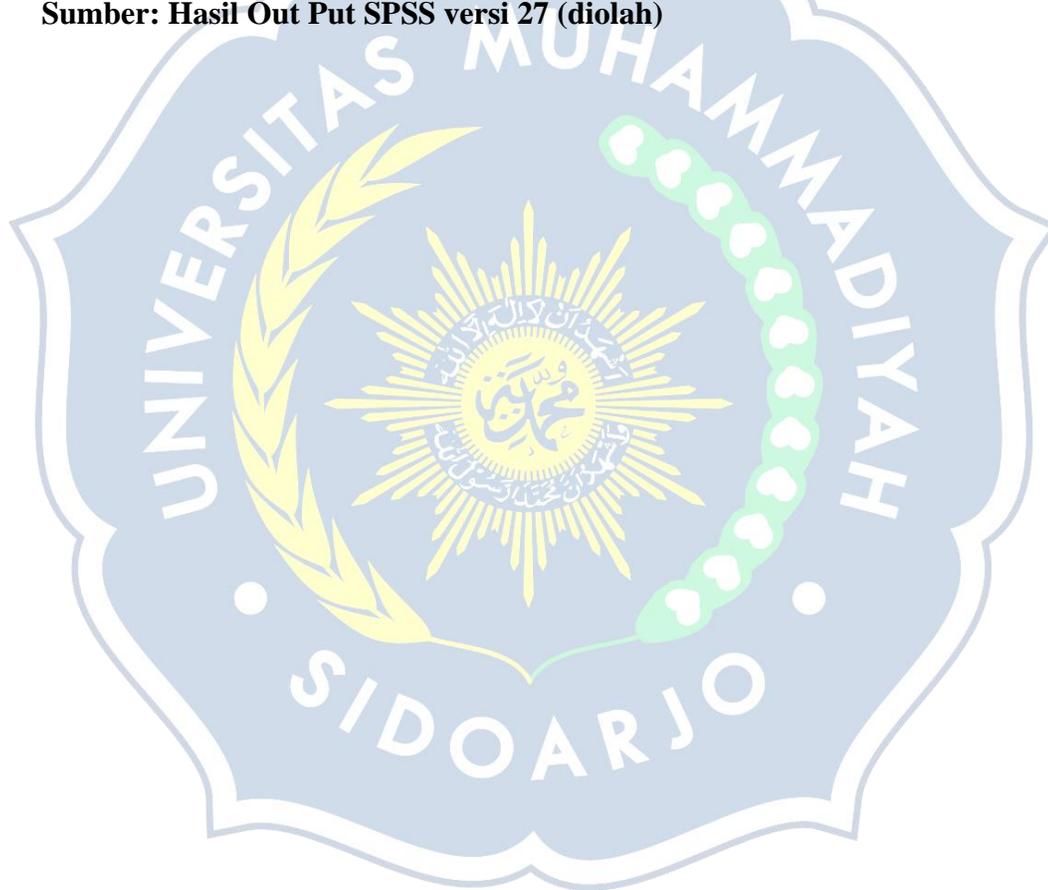
Sumber : Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)



Lampiran 13. Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.785	1.715		4.538	.000
	Alokasi Dana Desa	4.027	.033	.047	3.832	.006
	Dana Desa	5.140	.041	.194	3.428	.001
	Bantuan Keuangan APBD	3.276	.053	.285	5.188	.000

Sumber: Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)



Lampiran 14. Hasil Uji R Square

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.875 ^a	.840	.832	1.273	1.721
a. Predictors: (Constant), Bantuan Keuangan APBD , Alokasi Dana Desa , Dana Desa					
b. Dependent Variable: Belanja Desa					

Sumber: Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)



Lampiran 15. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.785	1.715		4.538	.000
	Alokasi Dana Desa	4.027	.033	.047	3.832	.006
	Dana Desa	5.140	.041	.194	3.428	.001
	Bantuan Keuangan APBD	3.276	.053	.285	5.188	.000

Sumber: Hasil Out Put SPSS versi 27 (diolah)



Lampiran 16. Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Uraian	Hasil	Keterangan
1	H1 : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa	Diterima	$0,006 < 0,05$
2	H2 : Dana Desa Berpengaruh Terhadap Belanja Desa	Diterima	$0,001 < 0,05$
3	H3 : Bantuan Keuangan APBD Berpengaruh Terhadap Belanja Desa	Diterima	$0,000 < 0,05$

Sumber: Hasil Di olah peneliti (2023)

